



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA STRATEGIS DINAS BMCKTR

2025 - 2029





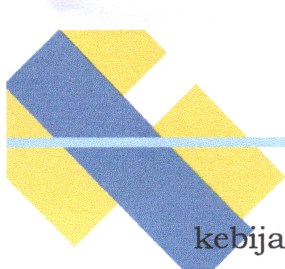
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran dokumen ini diharapkan menjadi landasan utama dalam mengarahkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun ke depan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan Renstra ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dokumen Renstra ini berisi perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil. Fokus utama diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, bangunan gedung, permukiman, air minum, sanitasi, serta penataan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tantangan ke depan tentu tidak ringan, terutama terkait keterbatasan anggaran, perubahan iklim, dinamika pembangunan wilayah, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin tinggi. Namun, dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, kita yakin target pembangunan infrastruktur yang andal, berkeadilan, dan berdaya saing dapat diwujudkan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari evaluasi capaian periode sebelumnya, analisis isu-isu strategis, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan partisipatif, dokumen ini menjadi refleksi atas pengalaman masa lalu sekaligus proyeksi ke depan, sehingga setiap



kebijakan yang tertuang memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

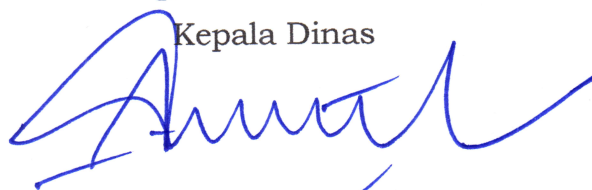
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra ini. Kontribusi aktif dari jajaran ASN di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang, serta kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan lahirnya dokumen ini. Semangat kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin diharapkan dapat terus berlanjut dalam tahap implementasi.

Harapan kami, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan benar-benar dapat dijadikan pedoman operasional dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah. Dengan pelaksanaan yang konsisten, adaptif terhadap perubahan, dan akuntabel, Renstra ini diyakini mampu mengarahkan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan kemudahan bagi kita semua dalam mengemban amanah pembangunan, serta memberikan keberkahan bagi setiap langkah pengabdian kita demi kemajuan Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai.

Padang, Desember 2025

Kepala Dinas



ARMIZOPRADES, ST.MT

NIP.19751201 200604 1 007

Pembina Tingkat I/IV.b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	14
2.1 GAMBARA PELAYANAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	14
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	14
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS SERTA FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	24
2.1.4 SUMBER DAYA NON-APARATUR	32
2.1.5 KINERJA PELAYANAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	48
2.1.6 KELOMPOK LAYANAN SASARAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT.....	54
2.1.7 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	56
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
2.2.1 PERMASALAHAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	58
2.2.2 ISU – ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ..	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	64
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG.....	70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	110
4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	110
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	196
BAB V PENUTUP	198



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 . 1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang	23
Gambar 2 . 2 Diagram Proporsi Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.....	24
Gambar 2 . 3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Gambar 2 . 4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2025	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2. 2 Rincian Pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan	26
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan	27
Tabel 2. 5 Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan ABK	28
Tabel 2. 6 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2023	33
Tabel 2. 7 Capaian SPM 2021 - 2024.....	48
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2021 – 2024	49
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat 2021 - 2024	52
Tabel 2. 10 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.....	56
Tabel 2. 11 Tantangan dan Peluang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.....	57
Tabel 2. 12 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	58
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.....	66
Tabel 3. 2 Strategi Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan Renstra 2025 - 2029	71
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	75
Tabel 4. 1 Program Kegiatan dan Subkegiatan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.....	111
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendanaan Perangkat Daerah.....	137
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	190
Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025 - 2029	196
Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	196



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang berfungsi untuk menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Selain itu, Renstra PD juga harus memuat sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Renstra memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menyebutkan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Hal inilah yang kemudian tertuang dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan ;
- b. Penyusunan Rancangan Awal ;
- c. Penyusunan Rancangan ;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah ;
- e. Perumusan Rancangan Akhir ;
- f. Penetapan Renstra

Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

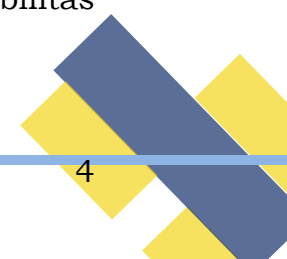
1. Pengolahan data dan informasi
 - a. Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
 - b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.

2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:
 - a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
 - b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
3. *Review* Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);
 - b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
 - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
 - b. Struktur dan pola ruang;
 - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - a. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD (potensi dan permasalahan pelayanan OPD);
 - b. Hasil review Renstra K/L;
 - c. Hasil penelaahan RTRW;
 - d. Hasil analisis dokumen KLHS;
 - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas BMCKTR Tahun 2025 – 2030 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, seperti ditampilkan pada Gambar 1.1



Game



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas



Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 
8. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 21. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
 24. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 2016 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
 32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

- 
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 - 2029
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud :

- a. Menjabarkan Visi Misi Kepala Daerah dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- b. Memberikan arah pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029.
- c. Sebagai dokumen induk perencanaan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- e. Sebagai pedoman perencanaan dan alat kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya



dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan



pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra



Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

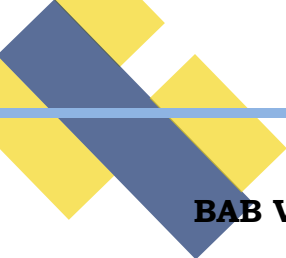
Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran Rancana Strategis
- 3.3 Arah Kebijakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran Rancana Strategis

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran Rancana Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah.

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra pada tahun 2025-2029
- 4.3 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029



BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta harapan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

2.1 Gambara Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020. Pembentukan dinas ini bertujuan untuk mengintegrasikan tugas dan fungsi dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan bangunan Gedung serta Kawasan strategis, sekaligus penataan ruang wilayah secara terpadu dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lahir melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, urusan wajib pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang meliputi :

1. Urusan Pekerjaan Umum; dan
2. Urusan Penataan Ruang

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Pergub Nomor: 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan dinas

daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Fungsi Struktur Organisasi Perangkat Daerah

3Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
- c. Penyelenggaraan Administrasi Dinas.

- 
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang).
 - e. Pelaksanaan fungsi lain oleh pimpinan.

4Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan ketatausahaan, penganggaran, data/informasi, keuangan, kepegawaian, aset, arsip dan tata laksana organisasi serta pembinaan/pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumah tanggaan
- e. Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
- h. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas yang
- i. Menjadi tanggung jawab Dinas;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Penyelenggaraan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi Berbasis komputerisasi/web;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5 Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan Pembangunan dan preservasi jalan/jembatan, pengamanan bagian – bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/preservasi jalan/jembatan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/preservasi jalan/jembatan dengan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
- g. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6 Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan



sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- c. Melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakaryaan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur Pembangunan Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
- h. Penyelenggaraan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
- j. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7 Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
- b. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Penyelenggaraan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan pembentukan Forum Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8 UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi (LBK)

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.



UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9 UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung (P2BG)

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

- 
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
 - d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10 UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
4. Seksi Workshop dan Perbekalan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11 UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I – VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

1. Kepala UPTD

- 
2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Seksi Jalan dan Jembatan I
 4. Seksi Jalan dan Jembatan II
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

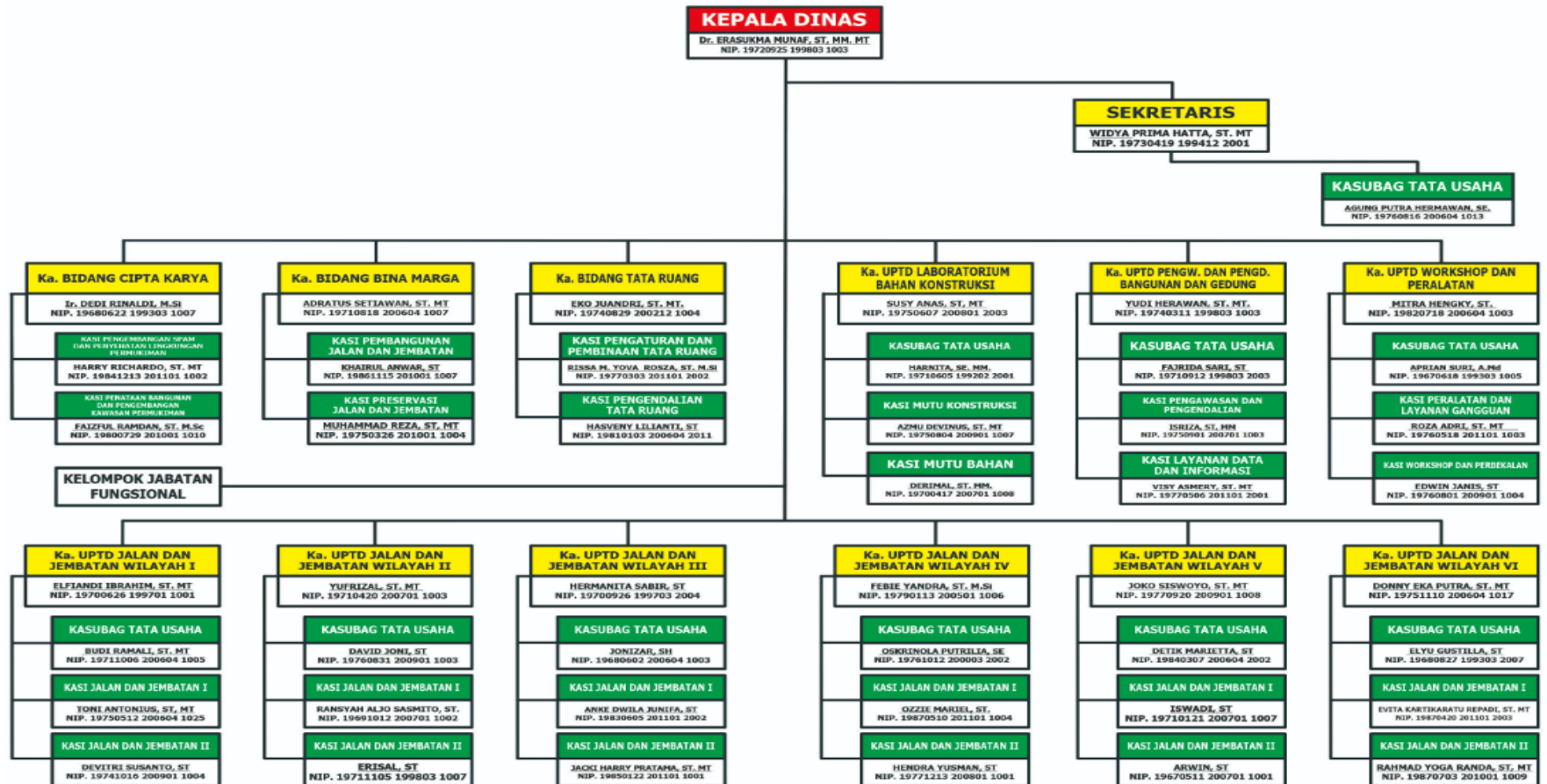
UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

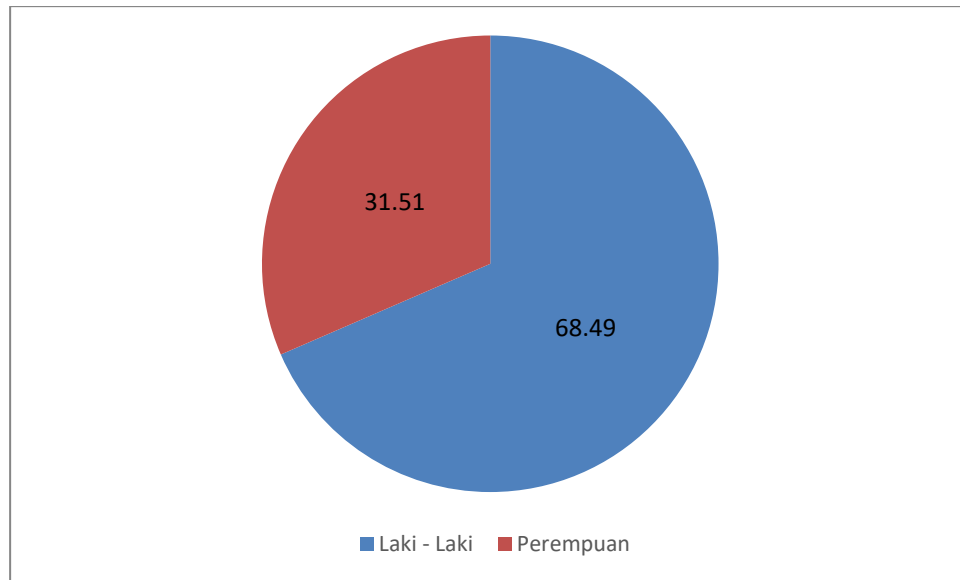
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT



Gambar 2 . 1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruan

2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (*agustus 2025*), dengan rincian seperti ditampilkan pada diagram dibawah ini.



Gambar 2 . 2 Diagram Proporsi Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Data Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025, berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	200	68,49 %
Perempuan	92	31,15 %

Berikut merupakan tabel rincian Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2025.

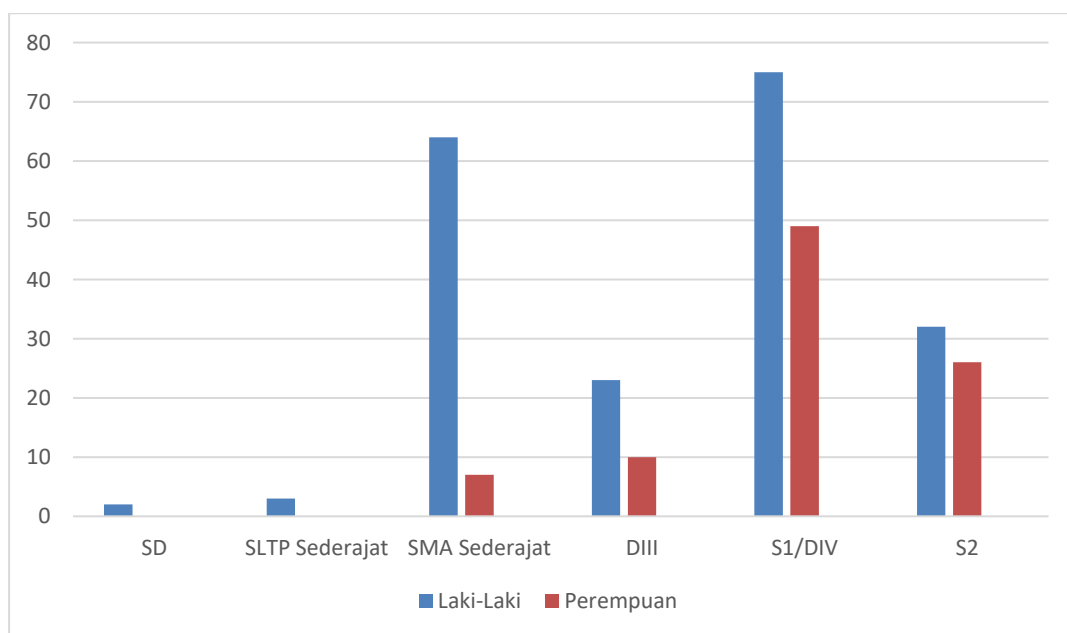
Tabel 2. 2 Rincian Pegawai Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

No.	RINCIAN PEGAWAI	JUMLAH (Orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
I.	JENIS KELAMIN	306	306	309	301	292
1.	Pria	213	213	214	209	200
2.	Wanita	93	93	95	92	92
II.	PENDIDIKAN	306	306	309	301	292
1.	S-3	0	0	0	2	1
2.	Pasca Sarjana (S-2)	53	53	60	62	58
3.	Sarjana (S-1)	131	131	135	133	124
4.	Sarjana Muda (D-III)	33	33	25	25	33
5.	SLTA	81	81	81	81	71
6.	SLTP	6	6	6	6	3
7.	SD	2	2	2	2	2
III	ESELON	38	38	38	38	46
1.	II	1	1	1	1	1
2.	III	13	13	13	13	13
3.	IV	24	24	24	24	32

Pemetaan pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	2	-	2
SLTP Sederajat	3	-	3
SLTA Sederajat	64	7	71
DIII	23	10	33
S1/DIV	75	49	124
S2	32	26	58
S3	1	-	1
Jumlah	200	92	292



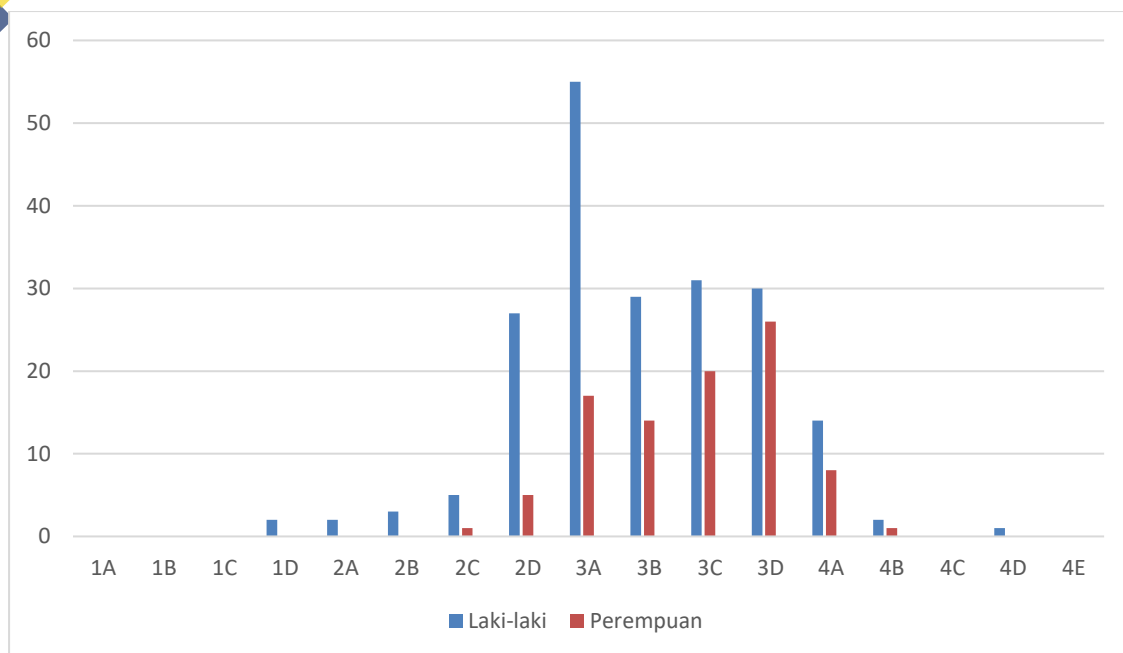
Gambar 2. 3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada berikut.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya Tata Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1a			
1b			
1c			
1d	2		2
2a	1		1
2b	3		3
2c	5	1	6
2d	27	5	32
3a	55	17	72
3b	29	14	43
3c	31	20	51
3d	30	26	56
4a	14	8	22
4b	2	1	3
4c			
4d	1		1
4e			
Jumlah	200	92	292

Sumber : Subbag Tata Usaha Dinas BMCKTR (Agustus 2025)



Gambar 2 . 4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2025

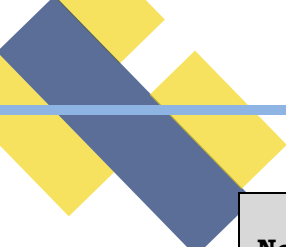
Tabel 2. 5 Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan ABK

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
1	KEPALA DINAS	1	1
2	Teknik Jalan dan Jembatan Madya	2	1
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya	2	0
4	Penata Ruang Madya	2	0
5	Penyehatan Lingkungan Madya	1	0
6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	3	0
7	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	3	0
8	Penata Ruang Muda	3	2
9	Penyehatan Lingkungan Muda	3	0
10	SEKRETARIS	1	1
12	KEPALA SUB BAGIAN	11	9

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
13	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	4	4
14	Bendahara	2	2
15	Penyusun Laporan Keuangan	1	1
16	Pengelola Barang Milik Negara	4	4
17	Pranata Kearsipan	2	2
18	Verifikator Keuangan	10	10
19	Pengelola Gaji	1	1
20	Pengelola Keuangan	29	29
21	Sekretaris (Pimpinan)	1	0
22	Pengolah Data	1	0
23	Pengelola Teknologi Informasi	1	0
24	Pengadministrasian Persuratan	1	0
25	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	11	11
26	Pengadministrasian Umum	42	37
27	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	6	4
28	Penyusun Bahan Informasi dan Publik	1	1
29	KEPALA BIDANG	3	3
30	KEPALA SEKSI	27	23
31	Jafung Teknik Jalan dan Jembatan PERTAMA	6	5
32	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	5	5
33	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	1	1
34	Penelaah Pengelola Leger Jalan	2	2
35	Pengelola Sistem Jaringan Jalan	2	2

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
36	Pengelola Pembinaan Pembangunan	5	3
37	Pengawas Jalan dan Jembatan	30	28
38	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	3	3
39	Pengelola Pembangunan dan Pemel. Jembatan	4	4
40	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	12	11
41	Pengawas Jaringan utilitas	1	1
42	Pengelola Pemelihara Jalan	1	1
43	Jafung Teknik Tata Bang. dan Perumahan PERTAMA	4	3
44	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	8	7
45	Pengawas Bangunan dan Gedung	10	6
46	Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan PERTAMA	2	1
47	Analisis Sumber Daya Air	2	1
48	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	2	2
49	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	2	2
50	Penata Bangunan dan Permukiman	1	1
51	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2	2
52	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	3	3
53	Pengelola Perencana Teknis Tata Bangunan	1	1
55	JAFUNG PENATA RUANG PERTAMA	6	3

No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
56	Analisis Pengembangan Wilayah	1	0
57	Analisis Tata Ruang	2	2
58	Penyusunan Rencana Tata Ruang	1	0
59	Pengelola Tata Ruang	1	0
60	Pengelola Geospasial	3	0
61	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3	1
62	Pengawas Tata Ruang	4	3
63	KEPALA UPTD	9	8
64	Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1	1
65	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	2	0
66	Pengadm. Sistem Info. Pengendalian Pemb.	1	0
67	Pengadministrasian Keuangan	2	2
68	Penelaah Mutu Konstruksi	2	2
69	Penguji Labor. Tanah, Aspal dan Beton	4	3
70	Penguji Bahan Bangunan	1	1
71	Pengelola Sampel Pengujian	3	2
72	Teknisi Laboratorium	2	0
73	Analisis sistem Mutu dan Lingkungan	1	1
74	Penelaah Bahan Jalan	1	1
75	Penguji Bahan Bangunan	1	2
76	Pengelola Sampel Pengujian	1	1
77	Teknisi Laboratorium	2	0
78	Analisis Infrastruktur	1	1



No	KETERANGAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN
79	Pengelola Rencana Pek. Umum & Perumahan	2	2
80	Operator Alat Berat	15	9
81	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	2	2
82	Pemelihara Peralatan	3	1
83	Pengelola Pemeliharaan Jalan	12	11
84	Pemelihara Jalan	52	37

2.1.4 Sumber Daya Non-Aparatur

1) Asset

Sumber Daya Non-Aparatur yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Asset yang berupa sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

OPD : DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Tabel 2. 6 Daftar Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2023



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (PER SUB RINCIAN)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1	01	01	04	TOTAL ASET	227	5.370	6.293.208.608.828,05	4.268.892.135.749,62	2.024.316.473.078,44	198.817.765.066,57
						ASET TETAP	227	3.785	6.245.011.090.915,77	4.251.929.515.847,98	1.993.081.575.067,80	198.483.811.994,65
						TANAH	227	-	466.503.802.488,06	-	466.503.802.488,06	-
						TANAH	227	-	466.503.802.488,06	-	466.503.802.488,06	-
						TANAH PERSIL	13	-	59.721.012.000,00	-	59.721.012.000,00	-
						TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	13	-	59.721.012.000,00	-	59.721.012.000,00	-
						TANAH NON PERSIL	9	-	75.281.991.850,00	-	75.281.991.850,00	-
						TANAH KERING	9	-	75.281.991.850,00	-	75.281.991.850,00	-
						LAPANGAN	205	-	331.500.798.638,06	-	331.500.798.638,06	-
						TANAH UNTUK JALAN	143	-	307.607.801.748,06	-	307.607.801.748,06	-
						TANAH KAMPUNG	62	-	23.892.996.890,00	-	23.892.996.890,00	-
		2	01	01	03	PERALATAN DAN MESIN	-	2.851	92.880.531.015,51	79.852.262.355,30	13.028.268.660,21	4.811.203.524,72
						ALAT BESAR	-	92	44.924.876.189,00	38.909.819.728,64	6.015.056.460,36	2.200.084.403,04
						ALAT BESAR DARAT	-	65	39.752.489.789,00	33.912.114.757,36	5.840.375.031,64	2.056.975.117,32
						GRADER	-	6	5.213.709.600,00	4.901.713.600,24	311.995.999,76	77.999.000,04
						EXCAVATOR	-	3	4.069.992.000,00	2.903.376.000,00	1.166.616.000,00	269.983.200,00
						HAULER	-	10	3.515.431.150,00	3.515.431.150,00	-	73.565.535,12
						ASPHALT EQUIPMENT	-	1	1.849.924.715,00	1.849.924.715,00	-	-
						COMPACTING EQUIPMENT	-	17	5.668.633.400,00	3.625.933.399,84	2.042.700.000,16	382.449.989,88
						AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	-	1	17.760.000,00	3.552.000,00	14.208.000,00	1.776.000,00
						LOADER	-	12	12.107.105.324,00	9.815.976.291,80	2.291.129.032,20	877.233.032,40
						ALAT PENGANGKAT	-	15	7.309.933.600,00	7.296.207.600,48	13.725.999,52	373.968.359,88
						ALAT BANTU	-	27	5.172.386.400,00	4.997.704.971,28	174.681.428,72	143.109.285,72
						FEEDER	-	3	373.230.000,00	373.230.000,00	-	-
						COMPRESSOR	-	11	2.808.952.900,00	2.808.952.900,00	-	-
						ELECTRIC GENERATING SET	-	3	1.011.561.000,00	1.011.561.000,00	-	6.072.857,16
						POMPA	-	8	246.852.500,00	184.962.499,56	61.890.000,44	32.494.999,92
						MESIN BOR	-	2	731.790.000,00	618.998.571,72	112.791.428,28	104.541.428,64
		02	01	01	01	ALAT ANGKUTAN	-	64	13.177.277.586,00	9.988.112.911,32	3.189.164.674,68	761.897.175,12
						ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	63	13.174.963.236,00	9.986.955.736,32	3.188.007.499,68	760.740.000,12
						KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	13	3.271.847.000,00	3.271.847.000,00	-	-
						KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	23	5.505.423.236,00	4.079.634.485,96	1.425.788.750,04	441.483.750,00
						KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	13	4.053.493.000,00	2.513.686.750,12	1.539.806.249,88	277.481.250,00

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	14	344.200.000,00	121.787.500,24	222.412.499,76	41.775.000,12
				02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	2.314.350,00	1.157.175,00	1.157.175,00	1.157.175,00
			03		01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	1	2.314.350,00	1.157.175,00	1.157.175,00	1.157.175,00
						ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	206	3.425.462.269,60	2.359.108.570,40	1.066.353.699,20	272.067.130,20
				01		ALAT BENGKEL BERMESIN	-	16	1.930.452.221,60	960.607.810,60	969.844.411,00	192.498.522,12
					01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	-	14	1.917.785.221,60	950.820.810,60	966.964.411,00	191.778.522,12
					02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	-	2	12.667.000,00	9.787.000,00	2.880.000,00	720.000,00
				02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	159	525.894.228,00	465.970.587,68	59.923.640,32	38.647.959,96
					01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	-	141	279.064.800,00	234.406.160,16	44.656.639,84	15.770.960,04
					05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	-	16	238.618.160,00	223.351.159,52	15.267.000,48	21.989.999,88
					07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	-	2	8.211.268,00	8.211.268,00	-	887.000,04
				03		ALAT UKUR	-	31	969.115.820,00	932.530.172,12	36.585.647,88	40.920.648,12
					01	ALAT UKUR UNIVERSAL	-	9	55.714.820,00	43.539.172,24	12.175.647,76	5.975.648,04
					08	ALAT UKUR/PEMBANDING	-	6	688.453.000,00	688.453.000,00	-	4.547.000,04
					09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	-	8	110.390.000,00	110.390.000,00	-	22.078.000,08
					10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	-	7	111.808.000,00	88.496.000,00	23.310.000,00	7.770.000,00
					20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	-	1	2.750.000,00	1.649.999,88	1.100.000,12	549.999,96
			05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	-	1.905	17.997.962.980,77	16.801.886.051,80	1.196.076.928,97	704.715.946,56
				01		ALAT KANTOR	-	132	1.134.349.500,00	1.007.695.198,68	126.654.301,32	115.580.899,56
					04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	111	929.110.500,00	830.560.198,76	98.550.301,24	101.400.699,60
					05	ALAT KANTOR LAINNYA	-	21	205.239.000,00	177.134.999,92	28.104.000,08	14.180.199,96
				02		ALAT RUMAH TANGGA	-	801	13.915.885.004,90	13.051.863.592,32	864.021.412,58	439.824.451,20
					01	MEUBELAIR	-	317	989.992.552,45	750.624.521,04	239.368.031,41	98.391.710,64
					03	ALAT PEMBERSIH	-	38	211.471.500,00	77.780.299,96	133.691.200,04	33.422.799,96
					04	ALAT PENDINGIN	-	60	6.865.013.182,45	6.636.967.901,16	228.045.281,29	85.378.840,56
					05	ALAT DAPUR	-	3	96.620.500,00	96.620.500,00	-	-
					06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	383	5.752.787.270,00	5.489.870.370,16	262.916.899,84	222.631.100,04
				03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	-	972	2.947.728.475,87	2.742.327.260,80	205.401.215,07	149.310.595,80
					01	MEJA KERJA PEJABAT	-	344	1.013.569.260,00	936.987.156,48	76.582.103,52	49.198.852,08
					02	MEJA RAPAT PEJABAT	-	33	241.737.100,00	231.222.859,60	10.514.240,40	8.769.419,88
					03	KURSI KERJA PEJABAT	-	336	710.589.050,00	666.736.391,64	43.852.658,36	24.905.110,56
					04	KURSI RAPAT PEJABAT	-	104	227.996.000,00	221.356.399,92	6.639.600,08	6.179.799,96
					05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	-	85	244.982.000,00	234.943.400,72	10.038.599,28	20.783.400,24
					06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	-	10	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-
					07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	-	60	486.855.065,87	429.081.052,44	57.774.013,43	39.474.013,08
			06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	80	1.209.769.335,00	1.098.485.947,64	111.283.387,36	52.742.688,12
				01		ALAT STUDIO	-	69	788.422.335,00	683.132.347,64	105.289.987,36	42.882.788,16
					01	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	35	251.530.850,00	238.312.500,16	13.218.349,84	12.219.350,04
					02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	24	322.492.690,00	230.421.052,48	92.071.637,52	30.663.438,12

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	-	10	214.398.795,00	214.398.795,00	-	-
				02		ALAT KOMUNIKASI	-	9	368.382.000,00	364.368.600,00	4.013.400,00	4.563.399,96
					01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	4	38.646.000,00	34.632.600,00	4.013.400,00	4.563.399,96
					05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	-	5	329.736.000,00	329.736.000,00	-	-
				03		PERALATAN PEMANCAR	-	2	52.965.000,00	50.985.000,00	1.980.000,00	5.296.500,00
					04	PERALATAN PEMANCAR UHF	-	1	33.165.000,00	33.165.000,00	-	3.316.500,00
					24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	-	1	19.800.000,00	17.820.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
			07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	2	17.629.847,00	17.629.847,00	-	-
				01		ALAT KEDOKTERAN	-	2	17.629.847,00	17.629.847,00	-	-
					01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	11.076.000,00	11.076.000,00	-	-
					19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	-	1	6.553.847,00	6.553.847,00	-	-
			08			ALAT LABORATORIUM	-	158	8.405.109.478,14	7.495.564.449,10	909.545.029,04	367.519.817,28
				01		UNIT ALAT LABORATORIUM	-	130	7.875.867.566,64	7.185.077.540,02	690.790.026,62	324.052.946,76
					03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	-	1	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-
					05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	-	3	471.965.000,00	471.965.000,00	-	-
					06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	-	33	2.072.478.200,00	1.826.498.479,92	245.979.720,08	118.185.839,88
					07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	-	36	2.156.378.222,50	2.154.178.222,62	2.199.999,88	1.100.000,04
					08	ALAT LABORATORIUM MEKANIK TANAH DAN BATUAN	-	17	944.195.500,00	535.755.899,96	408.439.600,04	164.828.899,92
					10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	-	5	22.106.970,00	18.388.969,96	3.718.000,04	1.583.499,96
					11	ALAT LABORATORIUM UMUM	-	4	20.083.500,00	20.083.500,00	-	-
					13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	-	9	192.192.000,00	185.769.600,00	6.422.400,00	21.156.400,08
					17	ALAT LABORATORIUM FILM	-	1	17.265.000,00	17.265.000,00	-	-
					24	ALAT LABORATORIUM PASIR	-	1	8.855.000,00	8.855.000,00	-	-
					30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	-	1	3.240.000,00	3.240.000,00	-	648.000,00
					35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	-	4	147.122.250,00	147.122.250,00	-	-
					40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	-	1	1.390.497.000,00	1.390.497.000,00	-	-
					41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	-	3	153.410.000,00	151.878.000,16	1.531.999,84	1.532.000,04
					45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	-	4	141.486.390,00	126.526.389,88	14.960.000,12	7.479.999,96
					49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	-	4	90.491.534,14	82.953.227,52	7.538.306,62	7.538.306,88
					51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	-	1	13.410.000,00	13.410.000,00	-	-
					55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	-	1	13.990.000,00	13.990.000,00	-	-
					56	ALAT LABORATORIUM LAIN	-	1	6.651.000,00	6.651.000,00	-	-
				02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	6	279.297.911,50	155.520.584,28	123.777.327,22	17.616.660,84
					01	ANALYTICAL INSTRUMENT	-	1	3.029.911,50	2.827.917,12	201.994,38	201.994,08
					02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	-	5	276.268.000,00	152.692.667,16	123.575.332,84	17.414.666,76
				03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	-	1	5.540.000,00	3.324.000,24	2.215.999,76	554.000,04
					05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	-	1	5.540.000,00	3.324.000,24	2.215.999,76	554.000,04
				04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	2	69.960.000,00	27.984.000,24	41.975.999,76	4.664.000,04
					04	RECORDER DISPLAY	-	2	69.960.000,00	27.984.000,24	41.975.999,76	4.664.000,04

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				06		RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	-	2	24.684.000,00	10.238.799,84	14.445.200,16	2.468.400,00
					03	PERALATAN HIDROLOGI	-	2	24.684.000,00	10.238.799,84	14.445.200,16	2.468.400,00
				07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	16	107.360.000,00	85.152.857,28	22.207.142,72	15.337.142,88
					05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	-	16	107.360.000,00	85.152.857,28	22.207.142,72	15.337.142,88
				08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	42.400.000,00	28.266.667,20	14.133.332,80	2.826.666,72
					08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	-	1	42.400.000,00	28.266.667,20	14.133.332,80	2.826.666,72
			10			KOMPUTER	-	322	3.561.096.971,00	3.079.094.169,80	482.002.801,20	411.839.774,64
				01		KOMPUTER UNIT	-	173	2.684.602.915,00	2.341.270.919,36	343.331.995,64	316.651.247,40
					01	KOMPUTER JARINGAN	-	52	908.947.425,00	854.945.675,04	54.001.749,96	104.421.250,08
					02	PERSONAL KOMPUTER	-	121	1.775.655.490,00	1.486.325.244,32	289.330.245,68	212.229.997,32
				02		PERALATAN KOMPUTER	-	149	876.494.056,00	737.823.250,44	138.670.805,56	95.188.527,24
					01	PERALATAN MAINFRAME	-	33	43.895.000,00	43.895.000,00	-	-
					02	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	34	185.618.730,00	183.406.229,96	2.212.500,04	15.901.874,88
					03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	69	436.910.110,00	322.933.054,48	113.977.055,52	68.046.027,36
					04	PERALATAN JARINGAN	-	13	210.070.216,00	187.588.966,00	22.481.250,00	11.240.625,00
			11			ALAT EKSPLORASI	-	2	4.091.759,00	2.045.879,52	2.045.879,48	1.022.939,76
				01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2	4.091.759,00	2.045.879,52	2.045.879,48	1.022.939,76
					02	UKUR/INSTRUMENT	-	2	4.091.759,00	2.045.879,52	2.045.879,48	1.022.939,76
			12			ALAT PENGEBORAN	-	3	87.550.000,00	65.662.500,24	21.887.499,76	21.887.500,08
				02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN	-	3	87.550.000,00	65.662.500,24	21.887.499,76	21.887.500,08
					02	PANTEK	-	3	87.550.000,00	65.662.500,24	21.887.499,76	21.887.500,08
			15			ALAT KESELAMATAN KERJA	-	17	69.704.600,00	34.852.299,84	34.852.300,16	17.426.149,92
				04		ALAT KERJA PENERBANGAN	-	17	69.704.600,00	34.852.299,84	34.852.300,16	17.426.149,92
					04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	-	17	69.704.600,00	34.852.299,84	34.852.300,16	17.426.149,92
		3				GEDUNG DAN BANGUNAN	-	83	148.848.580.562,00	25.390.849.852,58	123.457.730.709,42	3.016.102.980,66
			01			BANGUNAN GEDUNG	-	81	148.604.141.073,00	25.381.072.272,98	123.223.068.800,02	3.011.214.190,86
				01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	71	143.900.561.305,00	24.911.386.755,66	118.989.174.549,34	2.917.146.144,36
					01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	50	136.832.391.876,10	23.237.964.929,66	113.594.426.946,44	2.774.166.478,26
					02	BANGUNAN GUDANG	-	4	330.918.000,00	134.452.735,68	196.465.264,32	6.398.631,48
					03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	-	2	512.107.000,00	208.522.287,36	303.584.712,64	10.963.490,44
					05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	-	1	46.150.000,00	36.920.000,40	9.229.999,60	922.999,92
					08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	2	42.900.000,00	7.892.000,08	35.007.999,92	857.999,94
					09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	-	1	216.000.000,00	138.240.000,00	77.760.000,00	4.320.000,00
					11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	-	2	1.703.606.183,90	775.979.213,40	927.626.970,50	35.166.779,52
					25	BANGUNAN TERBUKA	-	4	2.983.895.679,00	119.355.827,04	2.864.539.851,96	59.677.913,52
					30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	1	779.831.000,00	233.949.299,40	545.881.700,60	15.596.619,96
					32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	-	4	452.761.566,00	18.110.462,64	434.651.103,36	9.055.231,32
				02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	10	4.703.579.768,00	469.685.517,32	4.233.894.250,68	94.068.046,50
					01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	7	4.369.740.480,00	412.513.200,36	3.957.227.279,64	87.592.260,72

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		4	04	01	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	-	1	228.735.288,00	23.171.117,28	205.564.170,72	4.373.705,76
					03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	-	2	105.104.000,00	34.001.199,68	71.102.800,32	2.102.080,02
						TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	2	244.439.489,00	9.777.579,60	234.661.909,40	4.888.789,80
						TUGU/TANDA BATAS	-	2	244.439.489,00	9.777.579,60	234.661.909,40	4.888.789,80
					01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	-	2	244.439.489,00	9.777.579,60	234.661.909,40	4.888.789,80
				01		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	523	4.785.034.471.103,47	4.134.870.503.159,66	650.163.967.943,82	190.430.672.239,27
						JALAN DAN JEMBATAN	-	522	4.781.424.661.103,47	4.134.148.541.159,66	647.276.119.943,82	190.310.345.239,27
					01	JALAN	-	94	4.389.539.866.579,73	4.016.020.492.207,85	373.519.374.371,89	182.766.150.036,25
						JALAN PROPINSI	-	91	4.360.296.108.346,73	3.993.293.022.734,99	367.003.085.611,75	181.112.864.221,21
					02	JALAN KERETA API	-	3	29.243.758.233,00	22.727.469.472,86	6.516.288.760,14	1.653.285.815,04
						JEMBATAN	-	428	391.884.794.523,74	118.128.048.951,81	273.756.745.571,93	7.544.195.203,02
					02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	-	428	391.884.794.523,74	118.128.048.951,81	273.756.745.571,93	7.544.195.203,02
		06			BANGUNAN AIR	-	1	3.609.810.000,00	721.962.000,00	2.887.848.000,00	120.327.000,00	
					BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	3.609.810.000,00	721.962.000,00	2.887.848.000,00	120.327.000,00	
				03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	3.609.810.000,00	721.962.000,00	2.887.848.000,00	120.327.000,00	
		5		07		ASET TETAP LAINNYA	-	16	26.634.399.685,28	11.815.900.480,44	14.818.499.204,84	225.833.250,00
						ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	16	26.634.399.685,28	11.815.900.480,44	14.818.499.204,84	225.833.250,00
					01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	16	26.634.399.685,28	11.815.900.480,44	14.818.499.204,84	225.833.250,00
						ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	16	26.634.399.685,28	11.815.900.480,44	14.818.499.204,84	225.833.250,00
					01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	312	725.109.306.061,45	-	725.109.306.061,45	-
						KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	312	725.109.306.061,45	-	725.109.306.061,45	-
				01		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	312	725.109.306.061,45	-	725.109.306.061,45	-
						KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	312	725.109.306.061,45	-	725.109.306.061,45	-
					01	ASET LAINNYA	-	1.585	48.197.517.912,28	16.962.619.901,64	31.234.898.010,64	333.953.071,92
						ASET TIDAK BERWUJUD	-	35	13.093.627.594,50	12.532.872.619,32	560.754.975,18	280.377.487,44
					01	ASET TIDAK BERWUJUD	-	35	13.093.627.594,50	12.532.872.619,32	560.754.975,18	280.377.487,44
						ASET TIDAK BERWUJUD	-	35	13.093.627.594,50	12.532.872.619,32	560.754.975,18	280.377.487,44
		4			09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	35	13.093.627.594,50	12.532.872.619,32	560.754.975,18	280.377.487,44
					ASET LAIN-LAIN	-	1.550	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	30.674.143.035,46	53.575.584,48	
				01	ASET LAIN-LAIN	-	1.550	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	30.674.143.035,46	53.575.584,48	
					ASET LAIN-LAIN	-	1.550	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	30.674.143.035,46	53.575.584,48	
				01	ASET LAIN-LAIN	-	1.550	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	30.674.143.035,46	53.575.584,48	
					ASET RUSAK BERAT/USANG	-	1.550	35.103.890.317,78	4.429.747.282,32	30.674.143.035,46	53.575.584,48	

KODE AKUN	KODE KELOMPOK	KODE JENIS	KODE OBYEK	KODE RINCIAN	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023	NILAI BUKU TAHUN 2023	BESAN PENYUSUTAN TAHUN 2023
							PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL HARGA									6.293.208.608.828,05	4.268.892.135.749,62	2.024.316.473.078,44	198.817.765.066,57
DISULATKAN									6.293.208.608.828	4.268.892.135.730	2.024.316.473.078	198.817.765.067

MENGETAHUI
KEPALA DINAS



(ERASUKMA MUNAF, ST, MM)
NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023
PENGURUS BARANG



ADRIANSYAH, A. Md)
NIP. 19780917 200901 1005



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KARTU INVENTARIS BARANG (SUB RINCIAN) KIB A (TANAH)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	89110	59.721.012.000,00	-	59.721.012.000,00	-
2	1.3.1.01.02.02	TANAH KERING	75930	75.281.991.850,00	-	75.281.991.850,00	-
3	1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	11967531	307.607.801.748,06	-	307.607.801.748,06	-
4	1.3.1.01.03.17	TANAH KAMPUNG	354628	23.892.996.890,00	-	23.892.996.890,00	-

NILAI PEROLEHAN	466.503.802.488,06
AKUMULASI PENYUSUTAN	-
NILAI/SALDO BUKU	466.503.802.488,06
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	-

MENGETAHUI

KEPALA DINAS

(ERASUKMA MUNAF, ST, MM)

NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023

PENGURUS BARANG

(ADRIANSYAH, A.Md)

NIP. 19780917 200901 1005



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KARTU INVENTARIS BARANG (SUB RINCIAN) KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1	1.326.820,00	1.326.820,00	-	-
2	1.3.2.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	1	1.472.240,00	1.472.240,00	-	-
3	1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	65	347.730.000,00	334.433.999,92	13.296.000,08	4.431.999,96
4	1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	76	682.765.349,50	615.440.675,82	67.324.673,68	35.271.882,36
5	1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	29	184.580.000,00	167.971.999,92	16.608.000,08	6.735.999,96
6	1.3.2.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	117.401.670,00	117.401.670,00	-	23.480.334,00
7	1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	5	16.720.000,00	16.720.000,00	-	-
8	1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	82	430.207.812,00	430.207.812,00	-	-
9	1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	2	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
10	1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	1	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-
11	1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	17	68.075.000,00	61.535.000,00	6.540.000,00	3.270.000,00
12	1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	3	401.140.000,00	401.140.000,00	-	-
13	1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	22	60.832.400,00	60.832.400,00	-	-
14	1.3.2.06.01.04	PERALATAN CETAK	1	4.041.345,00	2.424.807,00	1.616.538,00	808.269,00
15	1.3.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	1	706.004.112,00	706.004.112,00	-	141.200.822,40
16	1.3.2.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	2	2.193.332,00	1.973.998,08	219.333,92	219.333,12
17	1.3.2.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	1	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
18	1.3.2.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	4	21.230.000,00	21.230.000,00	-	-
19	1.3.2.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	1	56.192.252,00	56.192.251,80	0,20	11.238.450,36
20	1.3.2.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	14	53.873.820,00	53.873.820,00	-	-
21	1.3.2.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	1	12.751.200,00	12.751.200,00	-	-
22	1.3.2.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	4	319.776.420,00	319.776.420,00	-	-
23	1.3.2.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	1	1.859.770,00	1.859.770,00	-	-
24	1.3.2.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	13	37.685.450,00	37.685.450,00	-	-
25	1.3.2.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	1	2.500.000,00	2.333.333,52	166.666,48	166.666,68
26	1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	1	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
27	1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	10	66.237.900,00	65.678.110,36	559.789,64	559.790,04
28	1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	8	43.759.620,00	25.543.657,64	18.215.962,36	4.175.961,96
29	1.3.2.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	5	149.017.000,00	144.508.500,20	4.508.499,80	901.700,04
30	1.3.2.08.04.01	RADIATION DETECTOR	1	5.880.000,00	5.488.000,56	391.999,44	392.000,04
31	1.3.2.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	2	13.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	900.000,00
32	1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	1	17.760.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	4.440.000,00
33	1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	50	983.943.506,00	967.998.161,00	15.945.345,00	31.132.845,00
34	1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	16	63.260.048,00	55.434.441,76	7.825.606,24	8.010.952,08
35	1.3.2.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	2	35.580.384,00	17.790.192,00	17.790.192,00	8.895.096,00

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
36	1.3.2.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	33	52.150.000,00	52.150.000,00	-	-
37	1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	12	67.699.610,00	67.699.610,00	-	-

NILAI PEROLEHAN	5.035.347.060,50
AKUMULASI PENYUSUTAN	4.846.458.453,58
NILAI/SALDO BUKU	188.888.606,92
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	286.232.103,00

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(ERASUKMA MUNAF, ST, MM)

NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023

PENGURUS BARANG

(ADRIANSYAH, A.Md)

NIP. 19780917 200901 1005



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KARTU INVENTARIS BARANG (SUB RINCIAN) KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	50	122.835.629.176,10	20.453.239.749,66	102.382.389.426,44	2.477.597.747,46
2	1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	4	330.918.000,00	134.452.735,68	196.465.264,32	6.398.631,48
3	1.3.3.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	2	512.107.000,00	208.522.287,36	303.584.712,64	10.983.490,44
4	1.3.3.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	1	46.150.000,00	36.920.000,40	9.229.999,60	922.999,92
5	1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	2	42.900.000,00	7.892.000,08	35.007.999,92	857.999,94
6	1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1	216.000.000,00	138.240.000,00	77.760.000,00	4.320.000,00
7	1.3.3.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	2	1.703.606.183,90	775.979.213,40	927.626.970,50	35.166.779,52
8	1.3.3.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	4	2.983.895.679,00	119.355.827,04	2.864.539.851,96	59.677.913,52
9	1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	1	779.831.000,00	233.949.299,40	545.881.700,60	15.596.619,96
10	1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	4	452.761.566,00	18.110.462,64	434.651.103,36	9.055.231,32
11	1.3.3.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	7	3.931.668.480,00	368.706.000,36	3.562.962.479,64	78.830.820,72
12	1.3.3.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1	228.735.288,00	23.171.117,28	205.564.170,72	4.373.705,76

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
13	1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	2	105.104.000,00	34.001.199,68	71.102.800,32	2.102.080,02
14	1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	2	244.439.489,00	9.777.579,60	234.661.909,40	4.888.789,80

NILAI PEROLEHAN	134.413.745.862,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	22.562.317.472,58
NILAI/SALDO BUKU	111.851.428.389,42
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	2.710.772.809,86

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(ERASUKMA MUNAF, ST, MM)
NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023

PENGURUS BARANG

(ADRIANSYAH, A.Md)
NIP. 19780917 200901 1005



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KARTU INVENTARIS BARANG (SUB RINCIAN) KIB D (JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI)

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

NO.	KODE SUB RINCIAN	SUB RINCIAN	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.4.01.01.02	JALAN PROPINSI	91	4.360.296.108.346,73	3.993.293.022.734,98	367.003.085.611,75	1,81113E+11
2	1.3.4.01.01.07	JALAN KERETA API	3	29.243.758.233,00	22.727.469.472,86	6.516.288.760,14	1653285815
3	1.3.4.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	428	391.884.794.523,74	118.128.048.951,81	273.756.745.571,93	7544195203
4	1.3.4.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	1	3.609.810.000,00	721.962.000,00	2.887.848.000,00	120327000

NILAI PEROLEHAN	4.785.034.471.103,47
AKUMULASI PENYUSUTAN	4.134.870.503.159,65
NILAI/SALDO BUKU	650.163.967.943,82
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	190.430.672.239,27

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(ERASUKMA MUNAF, ST, MM)

NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023

PENGURUS BARANG

(ADRIANSYAH, A.Md)

NIP. 19780917 200901 1005

31 DESEMBER 2023
KBMD.Ver.1.5.4

LAPORAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI (SUB RINCIAN) TAHUN 2023 SEMESTER 2

Halaman 1 dari 1



PROVINSI
UNIT BIDANG

: SUMATERA BARAT
: DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang

KARTU INVENTARIS BARANG ASET TETAP LAINNYA

KODE LOKASI : 11.01.13.00.101033.00000.00000.XXXX

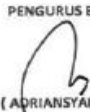
NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	JUDUL/PENCIPTA	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	ASAL-USUL	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.5.07.01.01.003	Fasilitas kesehatan kamar isolasi Covid-19	1	2020	0	387.100.000,00	1	BTT Covid-19	387.100.000,00	-	387.100.000,00	-
2	1.3.5.07.01.01.004	Jembatan Panel	1	2014	0	5.679.165.942,32	1	APBD	5.679.165.942,32	5.679.165.942,32	-	-
3	1.3.5.07.01.01.004	Jembatan Rangka Baja Type B40	1	2014	0	1.926.354.098,41	1	APBD	1.926.354.098,41	1.926.354.098,41	-	-
4	1.3.5.07.01.01.004	Jembatan Rangka Baja Type B60	1	2014	0	3.532.880.689,71	1	APBD	3.532.880.689,71	3.532.880.689,71	-	-
5	1.3.5.07.01.01.004	Jembatan Bailey Spesifikasi : Weight : 33,967 Kg, Kapasitas	1	2021	0	1.512.500.000,00	1	0	1.512.500.000,00	567.187.499,88	945.312.500,12	189.062.499,96
6	1.3.5.07.01.01.004	Sumur Bor Rutan Anak Aia	1	2021	0	294.166.000,00	1	0	294.166.000,00	110.312.250,12	183.853.749,88	36.770.750,04
7	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Parit Pengaliran	1	1950	0	129.800.000,00	1	0	129.800.000,00	-	129.800.000,00	-
8	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Air Hangat	1	1970	0	21.100.000,00	1	0	21.100.000,00	-	21.100.000,00	-
9	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Batang Kaluaran	1	1970	0	46.400.000,00	1	0	46.400.000,00	-	46.400.000,00	-
10	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Tampunik	1	1970	0	36.200.000,00	1	0	36.200.000,00	-	36.200.000,00	-
11	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Sungai Sapih	1	1998	0	499.893.500,00	1	0	499.893.500,00	-	499.893.500,00	-
12	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Air Sirih	1	2005	0	9.021.683.264,84	1	0	9.021.683.264,84	-	9.021.683.264,84	-
13	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Bukit Gadang	1	2008	0	1.446.000.000,00	1	0	1.446.000.000,00	-	1.446.000.000,00	-
14	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Gantung Limpo	1	2008	0	350.000.000,00	1	0	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	REGISTER	TAHUN PEROLEHAN	JUDUL/PENCIPTA	HARGA SATUAN	JUMLAH BARANG	ASAL-USUL	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN
15	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Sei Limau	1	2008	0	13.817.000,00	1	0	13.817.000,00	-	13.817.000,00	-
16	1.3.5.07.01.01.005	Jembatan Sei Pasak	1	2011	0	1.737.339.190,00	1	0	1.737.339.190,00	-	1.737.339.190,00	-

NILAI PEROLEHAN	26.634.399.685,28
AKUMULASI PENYUSUTAN	11.815.900.480,44
NILAI/SALDO BUKU	14.818.499.204,84
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	225.833.250,00

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(ERASUS M. MUNAF, ST, MM)
NIP. 19720925 199803 1003

Padang, 31 DESEMBER 2023
PENGURUS BARANG

(ADRIANSYAH, A.Md)
NIP. 19780917 200901 1005

2.1.5 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Adapun kinerja Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2021-2024 terkait dengan Standar Pelayanan Minimum atau pelayanan dasar yang mengacu pada Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Capaian SPM 2021 - 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0	0	0
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik oleh SPALD Regional (IPLT Regional / IPALD)	0	0	0	0

Sumber: LPPD Dinas BMCKTR tahun 2021 – 2024

Hingga tahun 2024 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provins Sumatera Barat belum memiliki target jumlah warga negara yang terlayani baik dalam jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan Pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini belum tersedianya SPAM Regional lintas kabupaten/ kota dan IPLT Regional.

Berikut juga disampaikan Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2024 yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 2021 – 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)				(8)			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja				BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	B	100	100	83.57	90.17
2	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				73.53	73.60	73.70	73.80	73.90	74.00	-	90.32	88.50	85.25	-	122.72	120.08	115.51
3	Rasio Kemantapan Jalan				73.92	75.00	77.00	79.00	81.00	82.00	75.03	71.39	67.99	70.55	101.50	95.19	88.30	89.30
4	Akses Air Minum layak				80.04	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.26	83.78	85.58	87.16	102.77	102.17	101.88	101.35
5	Akses Sanitasi Layak				80.04	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.05	83.08	84.95	86.70	102.51	101.32	101.13	100.81
6	Persentase bangunan strategis terbangun				38.05	40.22	55.55	66.67	83.33	100.00	-	6.00	6.00	11.00	-	14.92	10.80	16.50
7	Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis				NA	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	-	2.50	2.50	5.00	-	12.50	6.25	8.33
8	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Provinsi				84.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	86.00	86.00	87.75	89.53	102.38	100.00	100.86	101.74

Sumber: LKJIP Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode Renstra tahun 2021 - 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Selama periode 2021–2022, nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah berada pada kategori “BB” (Baik). Namun, pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi kategori “B” (Cukup Baik). Meskipun demikian, rasio capaian tetap menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 83,57% pada tahun 2023 menjadi 90,17% pada tahun 2024. Penurunan kategori ini menjadi catatan penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem manajemen kinerja agar target capaian renstra dapat dipertahankan atau ditingkatkan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Indikator ini menunjukkan tren yang sangat positif, dengan rasio capaian melampaui target secara signifikan setiap tahun. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 85,25 dengan rasio capaian sebesar 115,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah melebihi ekspektasi dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3. Rasio Kemantapan Jalan

Meskipun target renstra meningkat secara bertahap dari 73,92 (2021) menjadi 82,00 (2026), realisasi mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Rasio capaian pada tahun 2024 hanya mencapai 89,30%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan guna menunjang konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Akses Air Minum Layak

Capaian akses air minum layak terus menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 87,16 dari target 86,00 dengan rasio capaian sebesar 101,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa program penyediaan air minum telah berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. **Akses Sanitasi Layak**

Capaian akses sanitasi layak menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana realisasi tahun 2024 mencapai 86,70 dibanding target sebesar 81,00. Rasio capaian sebesar 106,98% menunjukkan keberhasilan program dalam mendukung pencapaian target pembangunan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

6. **Persentase Bangunan Strategis Terbangun**

Indikator ini menunjukkan realisasi yang belum optimal. Pada tahun 2024, realisasi baru mencapai 11,00 dari target sebesar 66,67, dengan rasio capaian hanya 16,50%. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan pembangunan pada lokasi-lokasi strategis yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kawasan.

7. **Persentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis**

Capaian penataan bangunan pada kawasan strategis masih tergolong sangat rendah. Realisasi tahun 2024 hanya mencapai 5,00 dari target 60,00, dengan rasio capaian sebesar 8,33%. Indikator ini menjadi perhatian utama dalam sisa periode renstra, sehingga perlu strategi percepatan dan penguatan koordinasi lintas sektor.

8. **Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi**

Indikator ini menunjukkan kesesuaian yang semakin meningkat antara pelaksanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 89,53 dari target 88,00 dengan rasio capaian sebesar 101,74%. Hal ini menunjukkan perencanaan pembangunan daerah telah mengacu dan sejalan dengan kebijakan tata ruang provinsi.

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat 2021 - 2024

Uraian	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)						(3)				(4)				(5)	(6)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	27,770,616,248	39,950,789,638	43,923,321,000	45,002,848,001	46,594,702,000	48,826,644,001	25,802,266,019	40,267,645,602	50,348,602,510	52,609,054,209	0.93	1.01	1.15	1.13	-0.71	-0.66
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	477,545,250	1,834,331,927	4,242,274,000	4,346,539,000	4,500,286,000	4,715,855,000	422,629,000	1,563,785,467	488,456,042	931,992,462	0.89	0.85	0.12	0.21	0.65	-0.63
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,911,650,700	318,855,760	643,071,000	658,876,000	682,182,000	714,859,000	1,910,227,193	705,275,800	577,305,597	3,976,984,789	1.00	2.21	0.90	5.83	-0.94	-0.65
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	321,022,840	175,638,750	716,650,000	734,263,000	760,236,000	796,652,000	304,882,572	352,714,189	383,075,080	599,176,777	0.95	2.01	0.53	0.79	-0.59	-0.67
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,547,654,030	2,592,370,696	535,821,000	548,990,000	568,409,000	596,637,000	6,474,400,950	2,389,150,200	515,183,560	489,934,210	0.99	0.92	0.96	0.86	-0.98	-0.99
Program Penataan Bangunan Gedung	129,658,305,503	20,860,614,769	23,078,041,000	23,645,244,000	24,481,630,000	25,654,330,000	79,520,802,283	44,099,506,427	64,504,362,801	22,089,970,854	0.61	2.11	2.80	0.90	-0.97	-0.95

Uraian	Target Renstra						Realisasi Capaian				Rasio Capaian				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)						(3)				(4)				(5)	(6)
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1,404,882,383	1,850,385,407	1,597,568,000	1,636,831,000	1,694,729,000	1,775,909,000	1,167,394,761	1,490,937,966	817,135,109	844,102,055	0.83	0.81	0.51	0.50	-0.79	-0.88
Program Penyelenggaraan Jalan	239,318,986,329	268,496,479,500	201,181,406,000	206,125,951,000	213,417,099,000	223,640,034,000	207,275,986,975	257,012,759,146	197,045,831,669	168,837,932,650	0.87	0.96	0.98	0.79	-0.84	-0.86
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,785,300,890	3,102,268,960	2,014,478,000	2,063,989,000	2,136,997,000	2,239,362,000	1,678,061,971	2,645,179,253	1,069,499,741	1,355,404,394	0.94	0.85	0.53	0.63	-0.79	-0.87

2.1.6 Kelompok Layanan Sasaran Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mewujudkan pelayanan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat utama dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kelompok sasaran ini mencerminkan orientasi pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pembangunan wilayah secara menyeluruh. Adapun kelompok sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum, khususnya pengguna infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar permukiman, termasuk masyarakat di kawasan perkotaan, perdesaan, serta wilayah rawan bencana yang membutuhkan aksesibilitas dan layanan infrastruktur yang memadai.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur, baik melalui kolaborasi antar-instansi maupun dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah.
3. Pelaku Usaha dan Dunia Industri, terutama penyedia jasa konstruksi, konsultan perencana dan pengawas, serta sektor logistik dan transportasi yang memanfaatkan infrastruktur jalan dan jaringan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa.
4. Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan infrastruktur serta pelestarian lingkungan binaan.
5. Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penghuni kawasan kumuh, serta masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil, yang membutuhkan



akses terhadap infrastruktur dasar, perumahan layak, serta lingkungan yang sehat dan aman.

6. Pengembang dan Investor, yang terlibat dalam pembangunan kawasan strategis, permukiman, dan infrastruktur pendukung, serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang selaras dengan tata ruang dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
7. Tenaga Ahli, Akademisi dan Lembaga Penelitian, sebagai mitra strategis dalam pengembangan inovasi, kajian teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang bina marga, cipta karya, dan tata ruang.

2.1.7 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima (5) tahun mendatang. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan yang dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.

Tabel 2. 10 Kekuatan dan Kelemahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Internal			
Kekuatan		Kelemahan	
1.	Tersedianya Peraturan perundangan yang mengatur regulasi kegiatan bidang BMCKTR. Adanya SDM pegawai BMCKTR yang terlatih dan berpengalaman.	1.	Masih rendahnya nilai kemantapan jalan Provinsi
2.	Adanya SK Gubernur No: 620-357-2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi	2.	Masih banyaknya jalan yang belum terkoneksi ke kawasan strategis.
3.	Telah tersusunnya RTRW Provinsi Sumbar.	3.	Masih adanya ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis seperti lebar, alinyemen, struktur lapisan.
4.	Dinas BMCKTR memiliki laboratorium konstruksi dan lingkungan sendiri.	4.	Keterbatasan lahan & adanya kendala pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
5.	Sumatera Barat memiliki potensi sumber air yang baik untuk memenuhi kebutuhan	5.	Masih ada bangunan pemerintahan, strategis, evakuasi yang belum selesai.

	air minum masyarakat .		
		6.	Masih adanya kawasan strategis yang belum tertata bangunan dan lingkungannya.
		7.	Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 11 Tantangan dan Peluang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Peluang		Tantangan	
1.	Tersedianya peraturan peraturan terkait infrastruktur.	1.	Sebagian besar wilayah Sumatera Barat rawan terhadap bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, kekeringan dan bencana lainnya
2.	Tersedianya teknologi pendukung yang membantu pekerjaan.	2.	Belum meratanya aksesibilitas jaringan jalan di provinsi Sumatera Barat dan jalan menuju provinsi tetangga.
3.	Tersedianya kesempatan tugas belajar, diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM	3.	Keterbatasan lahan serta rumitnya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan di daerah Sumatera Barat
		4.	Belum memadainya ketersediaan bangunan strategis dan bangunan evakuasi sementara
		5.	Masih banyaknya daerah kab/kota yang belum menyusun RDTR
		6.	Masih adanya penyedia jasa konstruksi yang berkualitas rendah
		7.	Belum terintegrasinya RTRW Provinsi dengan zona RZP3K

2.2 Permasalahan dan Isu Startegis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan dalam Pengelolaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemantapan jalan masih dibawah kemantapan jalan Nasional	Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak	Banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak akibat muatan lebih, kejadian bencana alam, dan kurangnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan jalan
			Belum terpenuhinya persyaratan minimum untuk lebar dan kualitas struktur jalan berkaitan dengan volume serta beban muatan ganda yang melewati standar
			Banyaknya lokasi rawan longsor, amblas, banjir.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum meratanya konektivitas jalan Provinsi	Lambatnya proses pelaksanaan pembangunan jalan untuk konektivitas	Belum meratanya konektivitas jalan antar daerah kabupaten/kota, /provinsi tetangga, jalan mitigasi bencana, jalan menuju kawasan strategis, dan akses jalan pesisir pantai barat Pulau Sumatera.
			Belum sinerginya penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten/Kota karena adanya pemisahan tugas dalam Undang Undang Jalan yang menyebabkan terkotak-kotaknya program penanganan jalan
			Sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan/ pelebaran jalan.
			Panjangnya proses perizinan akibat regulasi yang harus dilaksanakan untuk pembangunan jalan.
			Besarnya biaya penanganan jalan akibat topografi yang berada di daerah perbukitan/pegunungan.
3.	Masih rendahnya capaian akses air minum	Pembangunan infrastruktur belum menunjang peningkatan capaian akses secara signifikan	Belum tersedianya SPAM Regional
		Lamanya proses kesepakatan/ MOU lintas Kab/Kota	Keterbatasan sumber air baku di beberapa Kab/ Kota
4.	Masih rendahnya capaian akses air limbah	Rendahnya pelayanan air limbah regional	Pemerintah Provinsi belum bisa menunjang pembangunan untuk infrastruktur air limbah regional
			Topografi wilayah perbatasan yang belum menunjang untuk pembangunan infrastruktur air limbah regional
			Sulitnya pembebasan lahan
5.	Capaian pelayanan sampah masih rendah	Sulitnya mencari lokasi TPA Regional	Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPA Regional di beberapa Kab/Kota
			Keterbatasan lahan untuk pembangunan IPLT di beberapa Kab/Kota
6.	Belum tercapainya target pembangunan gedung infrastruktur di kawasan strategis	Target sumber dana selain APBD tidak tercapai	Masih belum tuntasnya pembangunan beberapa bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi dan bangunan evakuasi sementara (shelter) pada daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kab/Kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.
7.	Belum teranggarkannya di perencanaan pembangunan	Masih belum menjadi prioritas pembangunan daerah	Kurang Fokusnya pembangunan terhadap penataan bangunan dan lingkungannya pada Kawasan strategis
			Masih ada kawasan yang belum jelas status kepemilikan lahannya
8.	Masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang belum mengacu RTRW	Terdapat program strategis Kepala Daerah yang belum sesuai dengan indikasi program RTRW	Kebijakan pembangunan nasional dan strategis kepala daerah bersifat dinamis, sehingga rentan mengalami perubahan.
9.	Jumlah perda RDTR terbatas	Kab/Kota masih fokus dalam penyusunan RTRW	Adanya perbedaan tahun perencanaan dalam RTRW(20 tahun) dan rencana pembangunan (5 tahun pada RPJMD dan Renstra dan 1 Tahun pada RKPD dan Renja), sehingga adanya kemungkinan program pembangunan yang belum termuat dalam RTRW.
			Adanya perbedaan <i>timeline</i> perencanaan antar sektor, sehingga ada program sektoral yang belum terakomodir pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang.
			Adanya perubahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbagai Peraturan Pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dan Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan penataan ruang juga mengalami perubahan.
			Proses legalisasi Rencana Tata Ruang yang panjang dan melibatkan banyak sektor, sehingga proses legalisasinya menjadi lama.
			Urusan penataan ruang belum menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran.

2.2.2 Isu – Isu Strategis Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Penentuan Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dilakukan berdasarkan faktor-faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD; serta disesuaikan dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dilakukan skoring terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan :

- Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra OPD; K/L; serta pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD
- Merupakan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
- Berdampak besar pada publik
- Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
- Kemudahan untuk menangani
- Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, ada beberapa isu strategis dalam pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai berikut :

- Persentase kemantapan jalan provinsi Tahun 2024 sebesar 70,55. Nilai ini dibawah target yang ditetapkan pada tahu 2024 yaitu 71%;
- Belum selesainya proses rekonstruksi dan pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa bangunan strategis;
- Sebagaimana menjadi target dalam universal access, target capaian nasional untuk air minum dan rumah tangga bersanitasi masing-masing adalah 100%. Wilayah Sumatera Barat sendiri secara umum baru dapat mengakses layanan air minum layak pada tahun 2024 sebesar 87,16% dan rumah tangga bersanitasi layak sebesar 86,70% ;
- Perkembangan pembangunan di Sumatera Barat serta adanya program Nawacita mengakibatkan terjadinya dinamika pembangunan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat yang tidak terakomodir di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota;
- Penuntasan jalan tol menjadi strategis dalam membangun koneksi Sumatera Barat ke jaringan tol trans sumatera. Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan infrastruktur ini dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian. Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata menjadi strategis dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata sekaligus menggerakkan sektor perekonomian;
- Penuntasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi seperti Gedung Stadion Utama dan Gedung Kebudayaan menjadi penting untuk diselesaikan.

Isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian :

- Konektivitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi;
- Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas;

- 
-
- Meningkatnya produksi timbulan sampah membutuhkan respon terhadap penambahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan khususnya pengembangan pembangunan TPA Regional serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - Infrastruktur pelayanan dasar seperti pengembangan/pembangunan SPAM Regional dan IPLT Regional;
 - Penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan cerminan dari visi Kepala Daerah terpilih yang menjadi arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

VISI Gubernur Sumatera Barat yaitu :

SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN

Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. *Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.*
2. *Lambung pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.*
3. *Nagari/Desa sebagai basis kemajuan.*
4. *Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat*
5. *Membangun infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.*
6. *Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas.*
7. *Tingkatkan Daya saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM.*
8. *Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.*



Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian Misi ke-3 dan Misi ke-5, yaitu:

- *Misi 3 Nagari/Desa sebagai basis kemajuan*
- *Misi 5 Membangun infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana*

Selain itu, secara tidak langsung juga berperan dalam mendukung **Misi ke-7**, yaitu *Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Usaha Kecil*, melalui pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan visi, misi, serta isu-isu strategis daerah, tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang diarahkan untuk mendukung pencapaian hasil pembangunan yang terukur serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

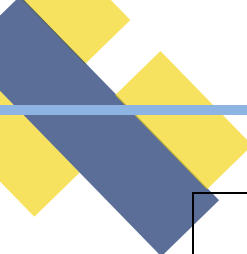
“Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas”

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.
- 2) Meningkatkan Cakupan Air Minum Perpipaan.
- 3) Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kelayakan fungsi Jalan Provinsi
- 5) Meningkatkan Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
- 6) Meningkatkan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata
- 7) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Meningkatkan Kualitas Layanan Organisasi

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6						7
Misi 3 : Nagari / Desa Sebagai Kemajuan Basis	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1. IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)			NA	78.00	79.00	79.50	80.00	80.50	
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan		2. Rata – rata Lama Waktu Tempuh pada Ruas Jalan utama Provinsi			2.95	2.85	2.75	2.66	2.58	2.50	
Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana		3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman			10.00	11.25	12.50	13.75	15.00	18.57	Mandatori
Sasaran 1 : Meningkatkan resiliensi daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		4. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan			41.23	44.17	47.12	50.06	53.00	55.92	Mandatori
Sasaran 3 : Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur											
			Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	10.00	11.25	12.50	13.75	15.00	18.57	Mandatori
			Meningkatnya Cakupan Air Minum Perpipaan	Akses RumahTangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	41.23	44.17	47.12	50.06	53.00	55.92	Mandatori



			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang ditata secara optimal	6.00	16.00	50.00	58.00	66.00	100.00	
			Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan RTRW Provinsi	88.50	89.00	89.50	90.00	90.50	91.00	
			Mempersingkat Waktu Tempuh pada Ruas Jalan Provinsi	Rata – rata Lama Waktu Tempuh pada Ruas Jalan utama Provinsi	2.95	2.85	2.75	2.66	2.58	2.50	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja	72.00	72.50	72.75	73.00	73.50	73.75	
			Meningkatnya kualitas layanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	85.25	85.50	85.75	86.00	86.25	86.50	

Dimana indikator untuk mencapai Sasaran tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah:

NO	IK	RUMUS	SATUAN	KETERANGAN
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)/(Kab/Kota) se Sumatera Barat}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya (Sumatera Barat)}} \times 100\%$	%	IK Sasaran
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Perkotaan yang Memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan}}{\text{Jumlah rumah tangga seluruhnya diperkotaan}} \times 100\%$	%	IK Sasaran
3	Rata-rata lama waktu tempuh pada ruas jalan utama provinsi	$\frac{\sum \text{Waktu Tempuh pada Ruas Utama Jalan Provinsi untuk Jarak per 100 Km}}{\text{Jumlah Ruas Utama Jalan Provinsi}}$	Jam/100 Km	IK Sasaran
4	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata secara optimal	$\frac{\text{Persentase Kemajuan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan}}{\text{Jumlah Unit Bangunan Gedung dan Kawasan yang Direncanakan untuk dibangun dan ditata}}$	%	IK Sasaran
5	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW Provinsi	$\frac{\text{Luas Kawasan yang Sesuai Pemanfaatan Ruangnya}}{\text{Luas Rencana Pola Ruang pada RTRW Provinsi}} \times 100\%$	%	IK Sasaran

Dalam Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, terdapat dua indikator sasaran Kepala Dinas pada bidang air minum dan sanitasi yang merupakan target mandatori, yaitu:

1. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.
2. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan Akses Sanitasi (air limbah domestik layak dan aman).

1. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Berdasarkan data BPS, capaian akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 41,23%. Sementara itu, data dasar yang dimiliki oleh Dinas

menunjukkan bahwa pada tahun 2024 cakupan Rumah Tangga terlayani jaringan perpipaan (perkotaan maupun perdesaan) sebesar 47,41%.

Yang dimaksud dengan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di wilayah perkotaan yang memperoleh air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum dari jaringan perpipaan;
2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
3. Ketersediaan air setiap saat dibutuhkan; dan
4. Memenuhi standar kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting tersebut, terlihat adanya kesenjangan capaian yang cukup besar dibandingkan target yang ditetapkan, sehingga terdapat risiko tidak tercapainya target akses air siap minum perpipaan pada rumah tangga perkotaan. Untuk mengurangi kesenjangan ini, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang melaksanakan berbagai upaya, antara lain:

- Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota serta kelembagaan pengelola air minum;
- Pembangunan SPAM Regional sebagai strategi penyediaan layanan air minum yang mampu menjawab keterbatasan ketersediaan air baku di kabupaten/kota.

2. Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Aman

Berdasarkan data BPS, capaian akses sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,57%, sementara berdasarkan akumulasi capaian kabupaten/kota pada tahun 2024 baru mencapai 6,64%. Akses Sanitasi Aman didefinisikan apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset berleher angsa;
2. Bangunan bawah menggunakan tangki septik yang disedot minimal sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir;

- 
3. Lumpur tinja hasil penyedotan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); atau
 4. Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses sanitasi aman di kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh ketersediaan IPLT. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kepemilikan IPLT masih sangat terbatas di sebagian besar kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang cukup besar antara target Renstra dengan capaian eksisting, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target akses sanitasi aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan serta pengembangan air limbah domestik kepada pemerintah kabupaten/kota;
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk mendorong pembangunan IPLT di daerah.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang merumuskan strategi dan arah kebijakan serta penahapan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai Tujuan Renstra 2025 - 2029

No	SASARAN RENSTRA	TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
1	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	-Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah -Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLTD -Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota - Pembangunan TPST Regional	-Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah -Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLTD -Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota - Pembangunan TPST Regional	-Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah -Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLTD -Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota - Pembangunan TPST Regional	-Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah -Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLTD -Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota - Pembangunan TPST Regional	- Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah - Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLTD -Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota

2	Meningkatnya Cakupan Air Minum Perpipaan	- Pembangunan SPAM IKK - Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat - Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	- Pembangunan SPAM IKK - Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat - Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	- Pembangunan SPAM IKK - Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat - Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	- Pembangunan SPAM IKK - Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat - Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum	- Pembangunan SPAM IKK - Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat - Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Meningkatnya Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	-Pembangunan Drainase Primer	-Pembangunan Drainase Primer	-Pembangunan Drainase Primer	-Pembangunan Drainase Primer	-Pembangunan Drainase Primer

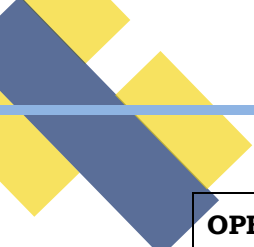
4	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	- Pembangunan dan Melanjutkan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat - Pembangunan RTH pada Wilayah Perbatasan Provinsi -Pembangunan Amphitheater -Pembinaan dan Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	- Pembangunan dan Melanjutkan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat - Pembangunan RTH pada Wilayah Perbatasan Provinsi -Pembangunan Amphitheater - Pembinaan dan Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	- Pembangunan dan Melanjutkan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat - Pembangunan RTH pada Wilayah Perbatasan Provinsi -Pembangunan Amphitheater -Pembinaan dan Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	- Pembangunan dan Melanjutkan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat - Pembangunan RTH pada Wilayah Perbatasan Provinsi -Pembangunan Amphitheater -Pembinaan dan Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	- Pembangunan dan Melanjutkan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi -Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat - Pembangunan RTH pada Wilayah Perbatasan Provinsi -Pembangunan Amphitheater -Pembinaan dan Pengawasan penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota
5	Meningkatnya Kelayakan Fungsi Jalan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas - ruas jalan kewenangan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas - ruas jalan kewenangan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas - ruas jalan kewenangan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas - ruas jalan kewenangan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas - ruas jalan kewenangan Provinsi

6	Terwujudnya Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang -Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang -Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi PenyusunanRencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang - Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang -Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang -Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi PenyusunanRencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang - Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang -Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang -Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi PenyusunanRencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang - Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang -Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang -Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi PenyusunanRencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang - Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang -Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang -Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi PenyusunanRencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatanruang dalam RTR - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang - Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
---	---	---	---	---	---	---

Dalam rangka mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas, arah kebijakan pembangunan daerah dituangkan secara sistematis melalui operasionalisasi NSPK yang selaras dengan RPJMD dan dijabarkan lebih teknis dalam Renstra Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3. 3 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	MISI 3 : Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan		
	Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi	- Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Air Limbah - Fasilitasi Kerja Sama/Pendampingan Percepatan Pembangunan Sarana Pengolahan Air limbah Kab/Kota - Penyusunan DED dan Pembangunan IPLT - Pembangunan Drainase Primer - Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS3-R/TPS Kab/kota - Pembangunan TPST Regional	- Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota - Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat
	MISI 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana		
	Percepatan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Kewenangan Provinsi	Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang - Pelaksanaan Audit Tata Ruang - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR



OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI
	Pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan	- Pembangunan dan peningkatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ruas-ruas jalan kewenangan Provinsi	- Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata - Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

Dengan arah kebijakan tersebut, Renstra menekankan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya layak dan merata, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan, ketangguhan menghadapi bencana, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.3 Proyek Strategis

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
	Bidang Bina Marga					(KM)											
1	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simancung - Tanjung Ampalu	0.500	0.200				3,000,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	44	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung)
2	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Tanjung Ampalu - Sinjunjung	1.000				0.100	6,000,000,000.00	-	-	-	600,000,000.00	40	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru	0.750	0.750	0.500	0.750	1.000	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,000,000,000.00	13	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung)
4	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Koto Baru - Tj. Simalidu	1.000	0.750		0.300	0.400	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00	-	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	26	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung)
5	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Koto Baru - Junction	0.400					2,400,000,035.76	-	-	-	-	47	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung -

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Pulau Punjung)
6	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Inderapura - Muara Sakai	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
7	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Manggopoh - Padang Luar	1.000	1.000	0.750	1.000	2.000	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi)
8	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Sicincin - Kurai Taji		0.750	0.500	0.500	0.750	-	4,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	27	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Panti - Simpang Empat	0.250	0.500	0.500	0.750	1.250	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	18	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Alung - Pariaman - Lubuk Basung - Simpang Ampek)
10	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simpang Empat - Sasak		0.500			0.250	-	3,000,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	43	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
11	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Sasak - Maligi	0.500	0.750	0.500	1.000	2.000	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	18,000,000,000.00	5	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
12	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Air Balam - Air Bangis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
13	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Kubu Kerambil - Bts. Batusan gkar (Simp. Kiamban g)			0.500	0.750	1.250	-	-	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	28	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Sawahlunt)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	o – Batusangkar – Padang Panjang)
14	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	1.000	0.500	0.500	0.750	1.250	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	16	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi – Payakumbuh – Bangkinang – Pekanbaru)
15	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	1.000	0.500	0.500	0.200	0.100	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,200,000,000.00	800,000,000.00	30	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Sawahlunto – Batusangkar – Padang Panjang)
16	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga)	0.500	0.750	0.750	1.000	1.250	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	7,500,000,000.00	11	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Sawahlunto – Batusangkar – Padang Panjang)
17	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Guguk Cino - Sitangkai	0.200	0.000	0.500	0.750	1.250	1,600,000,023.84	-	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	22	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi – Payakumbuh – Bangkinang – Pekanbaru)
18	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Sitangkai - Tanjung Ampalu	0.000	0.300	0.500	0.750	1.250	-	1,800,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	21	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok – Sawahlunto – Muaro Sijunjung – Pulau Punjung)
19	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	1.000	0.000	0.500	0.750	1.250	8,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00	8,500,000,000.00	14	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi – Payakumbuh – Bangkinang – Pekanbaru)
20	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Junction - Abai Siat (Bts. Jambi)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
21	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Sijunjung - Tanah Badantunng	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	1,200,000,017.88	-	-	-	-	51	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok – Sawahlunto – Muaro Sijunjung – Pulau Punjung)
22	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Padang Aro - Lubuk Malako	0.500	0.300	0.000	0.000	0.100	3,000,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	600,000,000.00	41	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Arosuka – Padang Aro – Sungai Penuh)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
23	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Lubuk Malako - Abai Sangir	0.000	0.500	0.500	0.750	1.000	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	23	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Arosuka - Padang Aro - Sungai Penuh)
24	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Abai Sangir - Sei. Dareh	1.500	1.750	1.500	2.000	4.000	15,000,000,000.00	17,500,000,000.00	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00	36,000,000,000.00	1	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Arosuka - Padang Aro - Sungai Penuh)
25	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Padang Sawah - Kumpulan	0.250	0.500	0.500	0.750	0.100	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	600,000,000.00	35	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Sikaping - Bukittinggi)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
26	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Bts. Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	0.000	0.750	0.500	0.500	0.100	-	4,500,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	600,000,000.00	36	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi)
27	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Sp. Pua Data - Sp. Sei Dadok - Museum PDRI	0.000	1.750	0.000	0.500	0.350	-	12,500,000,000.00	-	3,000,000,000.00	2,100,000,000.00	20	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang - Pekanbaru)
28	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Batu Sangkar - Ombilin	0.000	0.000	0.500	0.500	1.250	-	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	7,500,000,000.00	32	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Arosuka - Solok)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
29	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Solak - Alahan Panjang	0.000	0.500	0.250	0.500	1.250	-	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	7,500,000,000.00	29	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Arosuka - Padang Aro - Sungai Penuh)
30	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Lubuk Basung - Sungai Limau	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	3,000,000,000.00	-	-	-	-	45	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Alung - Pariaman - Lubuk Basung - Simpang Ampek)
31	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Pasar Baru - Alahan Panjang	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
32	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Duku (Ketapin g) - Pariaman	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
33	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur	0.500	1.000	1.250	1.000	2.000	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	11,000,000,000.00	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	2	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang - Pekanbaru)
34	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Koto Mambang - Balingka	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	1,200,000,017.88	-	-	-	-	52	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi)
35	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Baso - Piladang	0.500	0.500	0.500	0.200	0.200	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,600,000,000.00	1,200,000,000.00	34	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi - Payakumbuh - Bangkinang - Pekanbaru)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
36	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Matur - Palembang	0.250	0.500	0.000	0.500	0.350	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00	2,100,000,000.00	37	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi)
37	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Palembayan - Palupuh (Simp. Patai)	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	3,000,000,000.00	-	-	-	-	46	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Sikaping - Bukittinggi)
38	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Alahan Panjang - Kiliran Jao	0.400	0.500	0.500	0.500	2.500	3,200,000,047.68	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	21,000,000,000.00	8	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
39	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Sikunda - Garabak	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
40	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
41	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Gerbang Teluk Kabung - Mandeh	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	1,300,000,000.00	-	-	-	-	50	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang – Mandeh – Painan)
42	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Pelabuhan TPI Carocok - Tarusan	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	1,600,000,023.84	-	-	-	-	48	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang – Mandeh – Painan)
43	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Jalan Lingkar Selatan - Bts. Payakumbuh	0.000	0.500	0.500	0.400	0.000	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,400,000,000.00	-	38	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Bukittinggi – Payakumbuh – Bangkinang – Pekanbaru)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
44	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Balai Panjang - Sp. Pdg Karambi a - Tj. Bungo (TPA)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
45	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Surantiah - Kayu Aro - Langgai	1.000	0.600	0.500	0.750	1.200	6,000,000,000.00	6,000,000,238.42	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	12,000,000,000.00	9	Jalan Provinsi Yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah
46	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Duku - Sicincin	0.000	0.000	0.000	0.850	1.500	-	-	-	8,100,000,000.00	15,000,000,000.00	17	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Alung - Pariaman - Lubuk Basung - Simpang Ampek)
47	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Padang Koto Gadang - Palembang	0.000	0.500	0.500	0.750	1.250	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	4,500,000,000.00	7,500,000,000.00	19	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
48	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi	0.500	1.600	0.250	1.250	1.750	5,000,000,000.00	12,800,000,190.73	2,500,000,000.00	10,500,000,000.00	13,500,000,000.00	7	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Nasional (Lubuk Sikaping - Bukittinggi)
49	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Smp. Napar - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	0.000	0.000	0.000	0.250	0.500	-	-	-	2,000,000,00.00	3,000,000,00.00	42	Jalan Provinsi Yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah
50	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Ganting - Bts Tanah Datar - Sumani	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	-	600,000,000.00	-	-	-	53	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang - Arosuka - Solok)
51	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting	0.750	0.500	0.500	0.750	1.200	6,000,000,00.00	5,000,000,00.00	3,000,000,00.00	4,500,000,00.00	7,600,000,00.00	12	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok - Sawahlunto - Muaro Sijunjung - Pulau Punjung)
52	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Pintu Angin - Labuah Saiyo	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	-	-	-	-	1,500,000,00.00	49	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang – Arosuka – Solok)
53	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Rao - Rokan (Batas Riau)	0.000	0.500	0.000	0.500	0.400	-	3,000,000,00.00	-	3,000,000,00.00	2,400,000,000.00	39	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
54	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang)	0.500	0.500	0.500	1.000	2.000	5,000,000,000.00	5,000,000,00.00	5,000,000,00.00	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	6	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
55	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Bungo Tanjung - Teluk Tapang	0.700	0.500	0.500	1.000	2.000	7,000,000,000.00	5,000,000,00.00	5,000,000,00.00	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	4	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Lubuk Alung – Pariaman – Lubuk Basung – Simpang Ampek)
56	Penyelengaraan Jalan	Penyelengaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Teluk Bayur - Nipah - Purus	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	-	-		600,000,000.00	-	54	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Padang – Mandeh – Painan)
57	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Purus - Bandara Internasional Minangkabau	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
58	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
59	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	0.500	1.000	0.500	1.000	3.000	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	26,000,000,000.00	3	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
60	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Rawang - Talawi	0.000	0.500	0.500	0.750	0.900	-	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	7,500,000,000.00	9,000,000,000.00	15	Jalan Provinsi Yang Mendukung Integrasi Rantai Nilai Dan Pasok Logistik Di 9 Koridor Ruas Jalan Nasional (Solok – Sawahlunto – Muaro Sijunjung – Pulau Punjung)
61	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Simp Sp II - Kantor Camat	0.000	0.000	0.000	0.700	0.900	-	-	-	4,200,000,000.00	9,000,000,000.00	33	Jalan Provinsi Yang Mendukung Wilayah 3T

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
62	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Kantor Camat - Berkat	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-		
63	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Bonjol - Suliki	0.000	0.500	0.400	0.500	0.500	-	3,000,000,000.00	3,200,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	25	Jalan Provinsi Yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah
64	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Unggan - Pamusian - Tapi Selo	0.000	0.000	0.400	0.500	0.750	-	-	3,200,000,000.00	3,000,000,000.00	7,500,000,000.00	31	Jalan Provinsi Yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah
65	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rehabilitasi/Rekonstruksi		Tiku - Sasak	0.000	0.500	0.500	0.500	0.750	-	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	7,500,000,000.00	24	Jalan Provinsi Yang Mendukung Sektor Pertanian (Perkebunan Sawit)
	Bidang Cipta Karya																
	Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan																

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Pembangunan IPLT	Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan			1 unit		1 unit			7,000,000,00.00		7,000,000,00.00	2	Meningkatkan akses sanitasi aman Kab. Pasaman, dikarenakan belum memiliki IPLT sebagai sistem pengolahan air limbah di Kab. Pasaman.
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan Pengembangan TPA/TPS T/SPA/TPS-3R/TPS Kab/Kota	Pembangunan TPST	Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan	1 unit		1 unit		1 unit	7,000,000,00.00		7,000,000,00.00		7,000,000,00.00	1	Meningkatkan pengelolaan sampah terkelola dan menurunkan tingkat residu sampah yang ditimbun ke TPA
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPS T/SPA	Revitalisasi TPA	TPA Regional Payakumbuh	1 unit			1 unit		5,000,000,00.00			15,000,000,00.00		3	Melakukan Penutupan TPA Regional Payakumbuh,

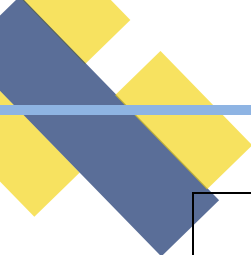
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Pembangunan TPST Regional	TPA Regional Payakumbuh		1 unit			1 unit		5,000,000,000.00			15,000,000,000.00	4	Pembangunan TPST Regional Payakumbuh sebagai sistem pengolahan sampah wilayah layanan TPA Regional Payakumbuh
5	Program Pengembangan Permukiman		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Pembangunan TPST di KSP/Perbatasan Kab/Kota	Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok, Kab. Pasaman Barat	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	5	Meningkatkan pengelolaan sampah terkelola dan menurunkan tingkat residu sampah yang ditimbun ke TPA
	Penataan Bangunan Kawasan Permukiman																

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Lanjutan Pembangunan Gedung Budaya	Kota Padang	31%	56%	67%	78%	100%	89,671,000,000.00	162,535,000,000.00	80,000,000,000.00	70,000,000,000.00	143,373,000,000.00	2	* Bangunan gedung sudah dalam Status KDP dalam jangka waktu yang lama *terakhir dilakukan pembangunan adalah pada tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	30%	35%	42%	42%	42%	3,300,000,000.00	77,000,000,000.00	104,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3	* Bangunan gedung sudah dalam Status KDP dalam jangka waktu yang lama *terakhir dilakukan pembangunan adalah pada tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Main Building	Kota Padang	0%	40%	81%	100%	100%	4,234,000,000.00	89,254,000,000.00	90,000,000,000.00	40,566,000,000.00	2,000,000,000.00	4	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Gedung Bersama dan Gedung Strategis Provinsi	Kota Padang	0%	7%	19%	50%	100%	8,467,000,000.00	40,642,000,000.00	68,782,000,000.00	171,439,000,000.00	280,269,000,000.00	5	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Gedung Belakang Kantor Gubernur	Kota Padang	100%					15,000,000,000.00					1	* Kondisi Bangunan Sudah terbengkalai Cukup lama * Berdasarkan Asesmen Kelayakan Struktur yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Andalas, Struktur Bangunan harus segera diperkuat/diperbaiki



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
																	segera. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Jambi (Sungai Rumbai)	Kab. Dharmasraya	100%					1,200,000,000.00					6	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Sumut (Rao)	Kab. Pasaman	100%					1,200,000,000.00					7	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Jambi (Tapan)	Kab. Pesisir Selatan			100%					1,200,000,000.00			9	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Jambi (Sangir)	Kab. Solok Selatan			100%					1,200,000,000.00			10	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
10	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Riau (Teluk Kuantan)	Kab. Sijunjung				100%					1,300,000,000.00		11	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan RTH Perbatasan Sumbar-Sumut (Ranah Batahan)	Kab. Pasaman Barat				100%					1,300,000,000.00		12	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
12	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan Amphitheater Pagaruyung	Kab. Tanah Datar					100%					4,920,000,000.00	13	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek	Proyek	Target Rencana Pelaksanaan					Indikasi Pagu					Urutan Proyek Prioritas	Justifikasi Prioritas
						2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pembangunan Amphitheater Puncak Paku	Kab. Pesisir Selatan		100%					14,100,000,000.00				8	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2025 - 2029 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Program Kegiatan dan Subkegiatan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
Misi 3 : Nagari / Desa Sebagai Basis Kemajuan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Cakupan Air Minum Perpipaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistim penyediaan air minum	Terlaksananya Infrastruktur Air Minum regional	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
Tujuan : Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/ desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Sasaran : Meningkatkan kualitas insfrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan								Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
								Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
								Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
								Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
		Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Meningkatnya layanan persampahan regional	Terlaksananya pembangunan TPA berskala regional	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
							Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
								Peningkatan TPA/TPST/SPA	
								Optimalisasi TPA/TPST/SPA	
								Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
								Pembangunan TPA/TPST/SPA	
								Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
								Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	
								Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Terlaksananya Infrastruktur IPLT regional yang layak	Persentase Peningkatan RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			
								Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
								Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
								Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
								Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
								Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
								Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
								Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Terlaksananya pembangunan Drainase Primer berskala regional	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
							Strategis Provinsi		
								Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
								Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
								Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
								Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
		Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Terlaksananya pembangunan Gedung strategis	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung			
							Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
								Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
								Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
								Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
								Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
								Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
								Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
								Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
								Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
								Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
								Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Terlaksananya penataan bangunan pada kawasan strategis	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
							Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
								Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
								Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
								Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
								Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana		Mempersingkat Waktu Tempuh pada Ruas Jalan Provinsi	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Terlaksananya pembangunan , peneliharaan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat								Rehabilitasi Jalan	
Sasaran : Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur								Rekonstruksi Jalan	
								Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
								Pengelolaan Leger Jalan	
								Pemeliharaan Rutin Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penggantian Jembatan	
								Pemeliharaan Berkala Jembatan	
								Pembangunan Underpass	
								Pelebaran Jembatan	
								Pembangunan Terowongan/Tunnel	
								Pelebaran Jalan Menuju Standar	
								Rehabilitasi Jembatan	
								Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
								Pembangunan Jembatan	
								Pembangunan Flyover	
								Pemeliharaan Berkala Jalan	
								Pemeliharaan Rutin Jembatan	
								Pembangunan Jalan	
								Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	
Meningkatnya resiliensi daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
								Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Kualitas Dokumen RTR dan jumlah yang dilegalisasi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang			Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
								Penetapan RTRW Provinsi	
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	
								Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
								Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
								Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	
							Penyusunan RTRW Provinsi	
							Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	
							Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	
							Penyusunan Peta Dasar	
							Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	
							Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
							Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	
							Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	
								Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
								Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
								Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
								Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
								Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
								Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
								Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
								Penilaian Perwujudan RTR	
								Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
								Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
								Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
								Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
								Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	
								Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	
								Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	
								Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
								Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	
								Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
								Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
								Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	
								Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
								Pelaksanaan Audit Tata Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
							Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
								Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	
							Pengawasan Penataan Ruang		
								Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
								Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
								Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
								Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	
								Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	
								Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
								Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	
								Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
								Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	
								Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
								Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
								Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
							Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
								Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	
							Pengawasan Penataan Ruang		
								Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
								Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
								Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Pengelolaan Kawasan Khusus	
					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
								Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
								Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
		Meningkatnya kualitas layanan organisasi							
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							Pemerintah Daerah	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
							Pengadaan Mebel	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
							Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Pengadaan Aset Tak Berwujud - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4	5	6	7		8
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Workshop dan Peralatan)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
								Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN			KET
1	2	3	4	5	6	7			8
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				369,916,564,920		566,146,101,689		870,342,233,512		887,822,504,108		916,222,786,352		1,220,879,113,323	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	56,090,820,643	100	57,341,947,871	100	58,202,077,089	100	59,075,108,246	100	59,961,234,868	100	60,860,653,392	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan	12 Bulan	272,646,717	12 Bulan	955,000,000	12 Bulan	1,051,000,000	12 Bulan	1,158,000,000	12 Bulan	1,277,000,000	12 Bulan	1,407,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 Dokume n	140,188,158	2 Dokume n	300,000,000	2 Dokume n	330,000,000	2 Dokume n	363,000,000	2 Dokume n	400,000,000	2 Dokume n	440,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	29,820,816	2 Laporan	90,000,000	2 Laporan	99,000,000	2 Laporan	109,000,000	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	132,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 Laporan	102,637,743	3 Laporan	220,000,000	3 Laporan	242,000,000	3 Laporan	267,000,000	3 Laporan	294,000,000	3 Laporan	324,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	0	1 Data	70,000,000	1 Data	77,000,000	1 Data	85,000,000	1 Data	94,000,000	1 Data	104,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	1 Berita Acara	125,000,000	1 Berita Acara	138,000,000	1 Berita Acara	152,000,000	1 Berita Acara	168,000,000	1 Berita Acara	185,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	0	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	77,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	94,000,000	1 Dokumen	104,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	0	1 Berita Acara	80,000,000	1 Berita Acara	88,000,000	1 Berita Acara	97,000,000	1 Berita Acara	107,000,000	1 Berita Acara	118,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan	12 Bulan	38,200,180,788	12 Bulan	35,853,267,198	12 Bulan	36,158,678,738	12 Bulan	36,692,687,824	12 Bulan	37,212,128,139	12 Bulan	37,799,885,064	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	331 Orang/bulan	331 Orang/bulan	36,238,501,485	331 Orang/bulan	34,843,000,000	331 Orang/bulan	35,133,257,532	331 Orang/bulan	35,651,885,300	331 Orang/bulan	36,155,713,577	331 Orang/bulan	36,727,624,283	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	1,911,679,303	12 Dokumen	911,000,000	12 Dokumen	924,665,000	12 Dokumen	938,534,975	12 Dokumen	952,613,000	12 Dokumen	966,902,195	SEKRETARIAT

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														DINAS BMCKTR
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	50,000,000	13 laporan	99,267,198	13 laporan	100,756,206	13 laporan	102,267,549	13 laporan	103,801,562	13 laporan	105,358,586	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan	12 Bulan	136,272,500	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	203,000,000	12 Bulan	206,045,000	12 Bulan	209,135,675	12 Bulan	212,272,710	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	136,272,500	1 laporan	200,000,000	1 laporan	203,000,000	1 laporan	206,045,000	1 laporan	209,135,675	1 laporan	212,272,710	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan	12 Bulan	620,760,000	12 Bulan	300,000,000	12 Bulan	554,500,000	12 Bulan	579,067,500	12 Bulan	593,703,513	12 Bulan	598,409,065	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	330 Stel					330 Stel	250,000,000	330 Stel	270,000,000	330 Stel	280,000,000	330 Stel	280,000,000	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	620,760,000	20 Orang	300,000,000	20 Orang	304,500,000	20 Orang	309,067,500	20 Orang	313,703,513	20 Orang	318,409,065	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12 Bulan	12 Bulan	1,443,420,302	12 Bulan	2,580,280,320	12 Bulan	2,622,751,363	12 Bulan	2,762,100,823	12 Bulan	2,778,485,654	12 Bulan	2,870,938,416	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,250,0 00	1 Paket	80,000,0 00	1 Paket	81,200,0 00	1 Paket	82,418,0 00	1 Paket	83,654,2 70	1 Paket	84,909,08 4	SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45,071,0 00	1 Paket	100,000, 000	1 Paket	101,500, 000	1 Paket	103,022, 500	1 Paket	104,567, 838	1 Paket	106,136,3 55	SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	0	1 Paket	25,000,0 00	1 Paket	30,000,0 00	1 Paket	30,000,0 00	1 Paket	30,000,0 00	1 Paket	35,000,00 0	UPTD PENGAW ASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUN AN DAN GEDUN G
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	0	3 Paket	30,000,0 00	3 Paket	32,000,0 00	3 Paket	32,000,0 00	3 Paket	32,000,0 00	3 Paket	32,000,00 0	UPTD Laborato rium Bahan Konstru ksi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,00 0	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,00 0	UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,750,00 0	1 Paket	5,000,00 0	1 Paket	5,000,00 0	1 Paket	5,000,00 0	1 Paket	5,007,58 2	1 Paket	5,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,750,00 0	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	15,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,750,00 0	1 Paket	10,000,0 00	1 Paket	10,000,0 00	1 Paket	11,500,0 00	1 Paket	12,000,0 00	1 Paket	13,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,750,00 0	1 Paket	6,500,00 0	1 Paket	6,825,00 0	1 Paket	7,166,25 0	1 Paket	7,524,56 3	1 Paket	7,900,791	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6,400,00 0	1 Paket	25,600,0 00	1 Paket	25,600,0 00	1 Paket	25,600,0 00	1 Paket	25,600,0 00	1 Paket	25,600,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H V
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,750,00 0	1 Paket	15,000,0 00	1 Paket	16,500,0 00	1 Paket	16,500,0 00	1 Paket	16,500,0 00	1 Paket	16,500,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H VI

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	101,500,000	1 Paket	103,022,500	1 Paket	104,567,838	1 Paket	106,136,355	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	30,000,000	1 Paket	31,500,000	1 Paket	32,000,000	1 Paket	32,000,000	1 Paket	32,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,500,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	30,500,000	12 Dokumen	30,500,000	12 Dokumen	30,957,500	12 Dokumen	31,421,863	12 Dokumen	31,893,190	12 Dokumen	32,371,588	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	706,512,000	12 Laporan	1,000,000,000	12 Laporan	1,015,000,000	12 Laporan	1,030,225,000	12 Laporan	1,045,678,375	12 Laporan	1,061,363,551	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	133,750,000	1 Laporan	137,556,250	1 Laporan	141,419,594	1 Laporan	140,340,888	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	0	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	135,000,000	1 Laporan	135,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	127,162,177	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	90,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	81,833,312	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	43,099,3 00	12 Laporan	50,000,0 00	12 Laporan	50,000,0 00	12 Laporan	100,000, 000	12 Laporan	58,800,0 00	12 Laporan	100,000,0 00	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	49,993,0 00	12 Laporan	101,406, 000	12 Laporan	102,546, 000	12 Laporan	104,826, 000	12 Laporan	109,386, 000	12 Laporan	112,806,0 00	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	38,879,5 00	12 Laporan	87,000,0 00	12 Laporan	88,000,0 00	12 Laporan	92,000,0 00	12 Laporan	102,043, 632	12 Laporan	109,296,1 44	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	65,123,5 00	12 Laporan	80,000,0 00	12 Laporan	84,000,0 00	12 Laporan	88,200,0 00	12 Laporan	92,610,0 00	12 Laporan	97,240,50 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	37,144,0 00	12 Laporan	74,288,0 00	12 Laporan	74,288,0 00	12 Laporan	84,844,0 00	12 Laporan	84,844,0 00	12 Laporan	84,844,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H V
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	82,724,0 00	12 Laporan	94,986,3 20	12 Laporan	98,909,8 63	12 Laporan	147,393, 335	12 Laporan	152,197, 570	12 Laporan	156,625,7 78	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H VI
Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokume n	14,790,2 50	1 Dokume n	45,000,0 00	1 Dokume n	45,675,0 00	1 Dokume n	46,360,1 25	1 Dokume n	47,055,5 27	1 Dokume n	47,761,36 0	SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokume n	126,521, 575	1 Dokume n	200,000, 000	1 Dokume n	203,000, 000	1 Dokume n	206,045, 000	1 Dokume n	209,135, 675	1 Dokume n	212,272,7 10	SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		12 Bulan	363,358, 500	12 Bulan	1,464,60 5,977	12 Bulan	1,518,11 2,411	12 Bulan	1,235,99 4,446	12 Bulan	1,367,79 2,569	12 Bulan	1,271,736 ,145	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		0	0											SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		0	0											SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		0	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000					UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		0	0	1 Unit	25,000,000	2 Unit	20,000,000			1.00	25,000,000			UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		0	0											UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan	4 Unit	0	0			1 Unit	35,600,000							UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan	-	-	0	1 unit	33,000,000	1 unit	33,000,000	1 unit	33,000,000					UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan			0	1 Unit	35,600,000	1 Unit	35,600,000							UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H V
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Unit kendaraan yang disediakan		1 Unit	0	1 Unit	35,600,000	2 Unit	35,600,000	2 Unit	35,600,000	2 Unit	35,600,000	2 Unit	35,600,000	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H VI

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0											UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0	1 Unit	35,847,9 00	1 Unit	55,625,0 00			1 Unit	50,000,0 00			UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-	0											UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	-	0											UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-	0	1 Unit	81,549,5 65	1 Unit	66,482,8 08	1 Unit	66,846,1 76	1 Unit	99,456,0 50	1 Unit	108,944,5 55	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			0			1 Unit	5,000,00 0							UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H V

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		-	0	1 Unit	35,000,0 00	1 Unit	35,000,0 00							UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H VI
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	0	1 Paket	200,000, 000	1 Paket	203,000, 000	1 Paket	206,045, 000	1 Paket	209,135, 675	1 Paket	212,272,7 10	SEKRET ARIAT DINAS BMCKTR
Pengadaan Mebel - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	0	1 Unit	30,000,0 00	1 Unit	32,000,0 00	1 Unit	32,000,0 00	1 Unit	32,000,0 00	1 Unit	35,000,00 0	UPTD Laborato rium Bahan Konstru ksi
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	0			1 Unit	10,000,0 00							UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0											UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	0					1 Paket	12,413,0 78					UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0			1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000			UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	4 Unit	23,739,600	4 Unit	23,739,600	4 Unit	23,739,600	4 Unit	23,739,600	4 Unit	23,739,600	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pengadaan Mebel - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	1 Unit	26,434,000	1 Unit	26,434,000	1 Unit	26,434,000	1 Unit	26,434,000	1 Unit	26,434,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		21 Unit	137,515,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	7,762,468			1 Paket	25,000,000			SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	0	9 Unit	100,000,000	4 Unit	90,000,000	4 Unit	90,000,000	4 Unit	90,000,000	4 Unit	90,000,000	UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			0	2 Unit	500,000, 000	2 Unit	500,000, 000	2 Unit	500,000, 000	2 Unit	500,000, 000	2 Unit	503,318,0 36	UPTD Laborato rium Bahan Konstru ksi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			0	1 Unit	50,000,0 00	1 Unit	50,000,0 00	1 Unit	50,000,0 00	1 Unit	111,510, 652	1 Unit	121,510,6 52	UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	0	1 Paket	25,000,0 00	1 Paket	7,762,46 8			1 Paket	25,000,0 00			UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	0											UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	0	1 Unit	31,510,662	1 Unit	42,329,100							UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	0			4 Unit	5,000,000	4 Unit	5,000,000					UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			23,286,000	5 Unit	44,916,592	1 unit	44,916,592	1 unit	44,916,592	1 unit	44,916,592	1 unit	44,916,592	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0	2,557,500	1 Paket	38,348,900	1 Paket	38,348,900							UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	200,000,000	1 Unit	8,058,758	1 Unit	14,911,475							UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - (UPTD Workshop dan Peralatan)				0											UPTD WORKS HOP DAN PERALATAN
Pengadaan Aset Tak Berwujud - (UPTD Workshop dan Peralatan)				0	1 Unit	30,000,000	1 Unit	40,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	60,000,000	1 Unit	70,000,000	UPTD WORKS HOP DAN PERALATAN
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		12 Bulan	10,176,813,361	12 Bulan	10,838,595,899	12 Bulan	10,968,677,649	12 Bulan	11,128,498,449	12 Bulan	11,273,457,155	12 Bulan	11,431,028,183	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	4,875,000	1 laporan	15,000,000	1 laporan	15,225,000	1 laporan	15,453,375	1 laporan	15,685,176	1 laporan	15,920,453	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	2,104,555,816	1 laporan	2,000,000,000	1 laporan	2,030,000,000	1 laporan	2,060,450,000	1 laporan	2,091,356,750	1 laporan	2,122,727,101	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60,675,0 00	12 Laporan	90,000,0 00	12 Laporan	90,000,0 00	12 Laporan	90,000,0 00	12 Laporan	90,000,0 00	12 Laporan	90,000,00 0	UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16,182,6 00	12 Laporan	20,000,0 00	12 Laporan	20,000,0 00	12 Laporan	20,000,0 00	12 Laporan	20,000,0 00	12 Laporan	20,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24,127,5 00	12 Laporan	24,127,5 00	12 Laporan	24,127,5 00	12 Laporan	24,127,5 00	12 Laporan	24,127,5 00	12 Laporan	24,127,50 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15,600,0 00	12 Laporan	17,000,0 00	12 Laporan	17,000,0 00	12 Laporan	20,000,0 00	12 Laporan	20,500,0 00	12 Laporan	20,500,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	23,302,5 00	12 laporan	13,000,0 00	12 Laporan	13,500,0 00	12 Laporan	13,500,0 00	12 Laporan	14,175,0 00	12 Laporan	14,883,75 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	19,880,000	12 Laporan	31,483,500	12 Laporan	31,483,500	12 Laporan	31,483,500	12 Laporan	31,483,500	12 Laporan	31,483,500	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	43,567,500	12 Laporan	43,567,500	12 Laporan	47,924,250	12 Laporan	52,716,675	12 Laporan	57,988,342	12 Laporan	63,787,176	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 laporan	5,814,871,401	1 laporan	6,000,000,000	1 laporan	6,090,000,000	1 laporan	6,181,350,000	1 laporan	6,274,070,250	1 laporan	6,368,181,304	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	625,000,000	1 Laporan	629,653,238	1 Laporan	650,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	434,766, 495	12 Laporan	490,000, 000	12 Laporan	490,000, 000	12 Laporan	490,000, 000	12 Laporan	490,000, 000	12 Laporan	490,000,0 00	UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	241,789, 990	12 Laporan	241,789, 990	12 Laporan	241,789, 990	12 Laporan	241,789, 990	12 Laporan	241,789, 990	12 Laporan	241,789,9 90	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	316,020, 424	12 Laporan	276,016, 871	12 Laporan	276,016, 871	12 Laporan	276,016, 871	12 Laporan	276,016, 871	12 Laporan	276,016,8 71	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237,062, 942	12 Laporan	244,623, 862	12 Laporan	244,623, 862	12 Laporan	244,623, 862	12 Laporan	244,623, 862	12 Laporan	244,623,8 62	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	355,349, 229	12 Laporan	250,000, 000	12 Laporan	255,000, 000	12 Laporan	260,000, 000	12 Laporan	270,000, 000	12 Laporan	275,000,0 00	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	226,824,150	12 Laporan	244,623,862	12 Laporan	244,623,862	12 Laporan	244,623,862	12 Laporan	244,623,862	12 Laporan	244,623,862	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237,362,814	12 Laporan	237,362,814	12 Laporan	237,362,814	12 Laporan	237,362,814	12 Laporan	237,362,814	12 Laporan	237,362,814	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		12 Bulan	4,877,368,475	12 Bulan	5,150,198,477	12 Bulan	5,125,356,928	12 Bulan	5,312,714,204	12 Bulan	5,249,532,164	12 Bulan	5,269,383,809	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	488,345,000	20 Unit	900,000,000	20 Unit	913,500,000	20 Unit	927,202,500	20 Unit	941,110,538	20 Unit	955,227,196	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	192,000,000	3 Unit	192,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Lapangan - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			86,865,5 00	1 Unit	150,000, 000	1 Unit	170,879, 568	1 Unit	192,072, 329	1 Unit	192,072, 329	1 Unit	192,072,3 29	UPTD WORKS HOP DAN PERALA TAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	63,315,0 00	5 Unit	35,000,0 00	5 Unit	35,000,0 00	5 Unit	74,705,7 55	5 Unit	35,000,0 00	5 Unit	76,691,54 6	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H I

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	64,015,0 00	7 Unit	69,065,0 00	7 Unit	69,065,0 00	7 Unit	69,065,0 00	7 Unit	69,065,0 00	7 Unit	69,065,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	43,990,0 00	4 Unit	52,000,0 00	4 Unit	52,473,5 80	5 Unit	56,000,0 00	5 Unit	58,000,0 00	5 Unit	58,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	77,140,000	7 unit	60,000,000	7 unit	60,000,000	7 unit	60,000,000	7 unit	60,000,000	7 unit	60,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	170,691,000	5 Unit	85,610,305	7 Unit	85,610,305	7 Unit	85,610,305	7 Unit	85,610,305	7 Unit	85,610,305	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	164,978,500	5 Unit	35,000,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Workshop dan Peralatan)				675,002,000	1 Unit	411,971,172	1 Unit	411,971,172	1 Unit	411,971,172	1 Unit	411,971,172	1 Unit	411,971,172	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)			6 Unit	104,501,000	6 Unit	35,000,000	6 Unit	35,000,000	6 Unit	46,334,375	6 Unit	35,000,000	6 Unit	60,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)			5 Unit	147,884, 500	5 unit	83,351,5 00	5 unit	90,831,8 03	5 unit	97,301,4 11	5 unit	101,622, 262	5 unit	107,216,3 27	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H II
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)		4 Unit	5 Unit	112,734, 000	5 Unit	40,000,0 00	5 Unit	40,000,0 00	5 Unit	50,000,0 00	5 Unit	55,000,0 00	5 Unit	55,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)			6 Unit	361,836, 000	6 unit	100,000, 000	6 unit	100,000, 000	6 unit	100,000, 000	6 unit	100,000, 000	6 unit	100,000,0 00	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)		-	-	0	8 Unit	65,550,500	8 Unit	65,550,500	8 Unit	71,826,482	8 Unit	84,037,447	8 Unit	96,431,577	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)		-	-	0	6 Unit	35,000,000	6 Unit	35,000,000							UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	364,750,000	20 Unit	750,000,000	20 Unit	761,250,000	20 Unit	772,668,750	20 Unit	784,258,781	20 Unit	796,022,663	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	0	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	3,550,000	10 Unit	4,000,000	11 Unit	4,000,000	13 Unit	5,500,000	13 Unit	8,000,000	13 Unit	8,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3,550,000	5 unit	6,500,000	5 unit	6,500,000	5 unit	6,500,000	5 unit	6,500,000	5 unit	6,500,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	710,000	10 Unit	710,000	12 Unit	710,000	14 Unit	1,420,000	14 Unit	1,420,000	14 Unit	1,420,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	0	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	8 Unit	5,720,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	0	13 Unit	300,000,000	13 Unit	304,500,000	13 Unit	309,067,500	13 Unit	313,703,513	13 Unit	318,409,065	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Jumlah aset yang Dipelihara				22 unit	200,000,000	22 unit	220,000,000	22 unit	220,382,500	22 unit	225,000,000	22 unit	225,000,000	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1,673,041,975	2 Unit	1,250,000,000	2 Unit	1,187,075,000	2 Unit	1,113,646,125	2 Unit	1,028,720,817	2 Unit	933,306,629	SEKRETARIAT DINAS BMCKTR
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	1 Unit	40,000,0 00	1 Unit	40,000,0 00			1 Unit	50,000,0 00	1 Unit	50,000,0 00	1 Unit	50,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H III
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		1 Unit	35,000,0 00	1 Unit	20,000,0 00	1 Unit	20,000,0 00	1 Unit	20,000,0 00	1 Unit	20,000,0 00	1 Unit	20,000,00 0	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H IV
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		1 Unit	115,469, 000	1 Unit	150,000, 000	1 Unit	150,000, 000	1 Unit	200,000, 000	1 Unit	200,000, 000	1 Unit	200,000,0 00	UPTD JALAN DAN JEMBAT AN WILAYA H V

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	71.00%	71.00%	246,768,425,878	72.15%	342,863,872,232	73.54%	379,731,568,025	74.48%	364,929,349,634	76.40%	411,558,575,874	79.47%	630,560,272,696	BIDANG BINA MARGA
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi	71.00%	71.00%	245,812,402,141	72.15%	342,863,872,232	73.54%	379,731,568,025	74.48%	364,929,349,634	76.40%	411,558,575,874	79.47%	630,560,272,696	BIDANG BINA MARGA
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diaasi	7 Dokumen KM	7 Dokumen KM	152,310,605	21.19	3,000,000,000	28.89	3,000,000,000	29.18	3,000,000,000	37.23	4,000,000,000	77.25	4,000,000,000	BIDANG BINA MARGA
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6.236 Km	6.236 Km	31,947,648,263	9.60	57,600,000,072	11.85	71,100,000,000	11.90	71,400,000,000	13.90	83,400,000,000	26.46	158,760,000,000	BIDANG BINA MARGA
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	7.86 Km	7.86 Km	47,067.614,480	3.90	31,200,000,048	5.15	41,200,000,191	1.30	10,400,000,000	2.85	22,800,000,000	3.20	25,600,000,000	BIDANG BINA MARGA
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	-	-	0	0.50	6,000,000,000	0.50	6,000,000,000	1.00	12,000,000,000	1.00	12,000,000,000	2.00	24,000,000,000	BIDANG BINA MARGA
Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	10 Dokumen	10 Dokumen	5,872,993,740	5.00	7,000,000,000	5.00	7,000,000,000	5.00	7,000,000,000	5.00	8,000,000,000	5.00	10,000,000,000	BIDANG BINA MARGA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jembatan yang Disusun														
Survey Kondisi Jalan/Jembat an	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 Dokumen KM	1 Dokume n KM	750,000, 000	1,690.50	1,000,00 0,000	1,690.50	1,000,00 0,000	1,690.50	1,000,00 0,000	1,690.50	1,000,00 0,000	1,690.50	1,000,000, 000	BIDANG BINA MARGA
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen KM	1 Dokume n KM	750,000, 000	1.00	1,000,00 0,000	1.00	1,000,00 0,000	1.00	1,000,00 0,000	1.00	1,000,00 0,000	1.00	1,000,000, 000	BIDANG BINA MARGA
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Diganti	-	-	0	132.00	45,300,0 00,000	245.70	47,067,5 00,000	113.00	31,075,0 00,000	76.00	22,500,0 00,000	77.50	21,312,50 0,000	BIDANG BINA MARGA
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1.37 Km	1.37 Km	9,461,28 8,480	1.19	2,985,46 9,526	4.89	12,228,7 37,119	7.33	18,332,4 18,493	8.73	21,825,0 61,504	23.49	58,726,83 5,629	BIDANG BINA MARGA
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	5 Jembatan	5 Jembata n	29,093,2 69,421	91.00	25,025,0 00,000	127.50	30,062,5 00,000	159.50	43,862,5 00,000	48.00	13,200,0 00,000	30.00	8,250,000, 000	BIDANG BINA MARGA
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7.44 Km	7.44 Km	89,636,2 60,624	6.00	96,100,0 00,000	6.50	96,000,0 00,238	7.65	101,500, 000,000	10.75	157,500, 000,000	22.10	246,000,0 00,000	BIDANG BINA MARGA
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara an Jalan/Jembat an	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraann ya	1690 Km	1690 Km	0	21.19	1,000,00 0,000	28.89	1,000,00 0,000	29.18	1,000,00 0,000	37.23	1,000,00 0,000	77.25	1,000,000, 000	BIDANG BINA MARGA
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara an Jalan/Jembat an - (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraann ya				12.00	500,000, 000	12.00	600,000, 000	12.00	700,000, 000	12.00	800,000, 000	12.00	1,000,000, 000	UPTD Laborato rium Bahan Konstru ksi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Workshop dan Peralatan)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			577,816,250	0.50	1,500,000,000	0.50	1,500,000,000	0.50	1,600,000,000	0.50	1,750,000,000	0.50	1,750,000,000	UPTD WORKS HOP DAN PERALATAN
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1603 M	1603 M	270,600,000	1,603	500,000,000	1,603.00	550,000,000	1,603.00	577,500,000	1,603.00	606,375,000	1,603.00	636,693,750	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	260.1 KM	260.1 KM	5,799,791,810	358.03	12,621,384,049	354.98	11,845,384,050	356.08	11,831,159,050	355.08	11,732,222,800	347.83	13,285,189,747	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,0874 Km	0,0874 Km	320,000,000	0.25	1,000,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	-	0	263.73	157,316,000	263.73	157,316,000	263.73	157,316,000	263.73	157,316,000	263.73	157,316,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	383.62 M	383.62 M	268,536,000	750	525,000,000	750	525,000,000	750	525,000,000	750	525,000,000	750	525,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	263.75 Km	263.75 Km	5,047,613,030	259.25	9,097,100,811	258.20	8,091,869,301	258.60	8,059,564,627	256.65	7,928,029,485	255.59	9,168,390,836	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.396 Km	0.396 Km	1,599,724,184	0.25	1,000,000,000	0.3	1,200,000,000	0.3	1,200,000,000	0.3	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	263.73 Km	263.73 Km	157,315,220	198.83	157,315,220	198.83	173,046,742	198.83	190,351,416	198.83	209,386,558	198.83	230,325,214	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	535.62 M	535,62 M	60,669,831	535.62	74,963,536	535.62	82,459,890	535.62	90,705,879	535.62	99,776,466	535.62	109,754,113	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	198.83 Km	198,83 Km	3,983,426,657	195.93	6,493,899,987	194.93	5,967,899,998	197.03	6,025,899,999	195.43	5,957,899,999	193.98	6,883,049,999	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	0,05 Km	120,000,000	0.25	1,000,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	198.83 Km	198,83 Km	157,042,388	198.83	157,315,220	198.83	173,046,742	198.83	190,351,416	198.83	209,386,558	198.83	230,325,214	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	83 Unit	1215.77 m	180,800,000	1215.77	500,000,000	1215.77	550,000,000	1215.77	577,500,000	1215.77	606,375,000	1215.77	636,693,750	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	257.91 Km	257.91	3,907,239,241	266.41	9,883,399,982	265.06	9,154,899,983	264.81	9,107,399,983	265.21	9,064,399,983	260.96	10,423,724,979	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.09 Km	0.09	120,000,000	0.25	1,000,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	-	0	252.42	105,000,000	252.42	115,500,000	252.42	121,275,000	252.42	127,338,750	252.42	133,705,688	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	209,33 Km	209,33 Km	225,286,000	1194.6	418,956,220	1194.6	418,956,220	1194.6	418,956,220	1194.6	418,956,220	1194.6	418,956,220	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	1,49 KM	1,49 KM	3,024,030,811	204.53	7,400,499,981	205.63	6,562,699,976	205.73	6,542,699,976	203.98	6,462,199,976	198.68	7,324,799,972	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1194,6 M	1194,6 M	306,306,000	0.25	1,000,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	0.30	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	209.33	217,96 Km	105,013,230	209.33	117,976,695	209.33	117,976,695	209.33	117,976,695	209.33	117,976,695	209.33	117,976,695	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemeliharaan Rutin Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	164,500,000	2438.17	600,000,000	2438.17	660,000,000	2438.17	726,000,000	2438.17	798,600,000	2438.17	878,460,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pemeliharaan Rutin Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	217.96 Km	217,96 Km	4,620,441,661	253.69	8,686,100,065	253.34	8,469,600,060	253.14	8,442,600,060	252.89	8,405,100,060	249.44	9,643,400,071	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pemeliharaan Berkala Jalan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.6 Km	0,6 Km	60,000,000	0.25	1,000,000,000	0.3	1,200,000,000	0.3	1,200,000,000	0.3	1,200,000,000	0.3	1,200,000,000	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan - (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	217.96 Km	217,96 Km	157,174,820	255.39	157,174,820	255.39	157,174,820	255.39	157,174,820	255.39	157,174,820	255.39	157,174,820	UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3,378,307,250		14,200,000,000		25,400,000,000		52,300,000,000		53,200,000,000		43,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota	2%		3,378,307,250	4.50%	7,800,000,000	21 %	21,500,000,000	37.50%	50,900,000,000	43.50%	50,000,000,000	45.00%	40,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41.23%			44.168%	6,400,000,000	47.106%	3,900,000,000	50.044%	1,400,000,000	52.982%	3,200,000,000	52.920%	3,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota				3,378,307,250		14,200,000,000		25,400,000,000		52,300,000,000		53,200,000,000		43,000,000,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya		1 Lembaga	76,330,475	1 Lembaga	200,000,000	1 Lembaga	200,000,000	1 Lembaga	200,000,000					BIDANG CIPTA KARYA
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		19 Kab/Kot a	2,925,977,250	19 Kab/Kot a	7,500,000,000	19 Kab/Kot a	1,000,000,000	19 Kab/Kot a	1,000,000,000	19 Kab/Kot a	1,000,000,000	19 Kab/Kot a	1,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersusun		1 Dokume n	87,877,150	3 Dokume n	1,300,000,000	3 Dokume n	1,500,000,000	1 Dokume n	900,000,000					BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				10 Liter/detik	5,000,000,000	340 Liter/detik	22,500,000,000	340 Liter/detik	50,000,000,000	340 Liter/detik	50,000,000,000	340 Liter/detik	40,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara										2 Unit	2,000,00 0,000	2 Unit	2,000,000, 000	BIDANG CIPTA KARYA
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggara an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/K ota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kerja sama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		19 Kab/Kot a	288,122, 300	19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	200,000, 000			BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGEMBAN GAN SISTEM DAN PENGELOLAA N PERSAMPAH AN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola di TPA/TPST Regional	12%	2 lokasi	1,868,75 5,566	15%	8,950,00 0,000	20%	1,800,00 0,000	25%	22,900,0 00,000	30%	49,700,0 00,000	35%	7,700,000 ,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				1,868,75 5,566		8,950,00 0,000		1,800,00 0,000		22,900,0 00,000		49,700,0 00,000		7,700,000 ,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pembinaan Pengembanga n TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengembangan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS				19 Kab/Kot a	7,200,00 0,000	19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	7,200,00 0,000	19 Kab/Kot a	14,200,0 00,000	19 Kab/Kot a	7,200,000, 000	BIDANG CIPTA KARYA
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggara an Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan				19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	200,000, 000	19 Kab/Kot a	200,000, 000			19 Kab/Kot a		BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan TPA/TPST/SP A	Terbangunnya TPA/TPST/SPA		-	723,869, 275	-	-		0	132 ton/hari	15,000,0 00,000	132 ton/hari	35,000,0 00,000	-	-	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan		2 Dokume n	1,144,886,250	3 Dokume n	1,550,000,000	2 Dokume n	1,400,000,000	1 Dokume n	500,000,000	1 Dokume n	500,000,000	1 Dokume n	500,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	10.00%	10.00%	683,171,415	11.25%	1,400,000,000	12.50%	1,400,000,000	13.75%	8,400,000,000	15.00%	1,000,000,000	18,57%	8,000,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				683,171,415		1,400,000,000		1,400,000,000		8,400,000,000		1,000,000,000		8,000,000,000	
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				19 Kab/Kota	500,000,000	19 Kab/Kota	500,000,000	19 Kab/Kota	7,500,000,000	19 Kab/Kota	500,000,000	19 Kab/Kota	7,500,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun														BIDANG CIPTA KARYA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan		1 Dokume n	241,620,275	2 Dokume n	800,000,000	2 Dokume n	800,000,000	2 Dokume n	800,000,000	1 Dokume n	400,000,000	1 Dokume n	400,000,000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun														
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggara an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/K ota	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		19 Kab/Kot a	441,551, 125	19 Kab/Kot a	100,000, 000	19 Kab/Kot a	100,000, 000	19 Kab/Kot a	100,000, 000	19 Kab/Kot a	100,000, 000	19 Kab/Kot a	100,000,0 00	BIDANG CIPTA KARYA
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ditingkatkan kapasitasnya														BIDANG CIPTA KARYA
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara														BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	0 %	3450 m	3,577,50 0	4%	2,000,00 0,000	8%	2,000,00 0,000	29%	11,200,0 00,000	81%	27,500,0 00,000	100%	10,000,00 0,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah				3,577,50 0		2,000,00 0,000		2,000,00 0,000		11,200,0 00,000		27,500,0 00,000		10,000,00 0,000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kab/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi															
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		1 Sistem Drainase Perkotaa n	3,577,50 0	1 Sistem Drainase Perkotaa n	2,000,00 0,000	1 Sistem Drainase Perkotaa n	2,000,00 0,000	2 Sistem Drainase Perkotaa n	11,200,0 00,000	1 Sistem Drainase Perkotaa n	27,500,0 00,000	1 Sistem Drainase Perkotaa n	10,000,00 0,000	BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGEMBAN GAN PERMUKIMA N	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	0 %			20%	7,800,00 0,000	40%	7,800,00 0,000	60%	12,200,0 00,000	80%	12,200,0 00,000	100%	12,200,00 0,000	BIDANG CIPTA KARYA
Penyelenggar aan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						7,800,00 0,000		7,800,00 0,000		12,200,0 00,000		12,200,0 00,000		12,200,00 0,000	
Pembangunan TPA/TPST/SP A/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				10 ton/hari	7,800,00 0,000	10 ton/hari	7,800,00 0,000	10 ton/hari	9,200,00 0,000	10 ton/hari	9,200,00 0,000	10 ton/hari	9,200,000, 000	BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun					0		0	2 liter/deti k	3,000,00 0,000	2 liter/deti k	3,000,00 0,000	2 liter/deti k	3,000,000, 000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Dalam Kondisi Baik	12%	3 unit	56,238,916,359	20%	123,519,933,686	35%	372,949,417,868	53%	346,683,646,228	71%	290,171,695,610	85%	434,215,993,569	BIDANG CIPTA KARYA
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			3 Unit	56,238,915,118	2 Unit	123,519,933,686	3 Unit	372,949,417,868	3 Unit	346,683,646,228	2 Unit	290,171,695,610	1 Unit	434,215,993,569	BIDANG CIPTA KARYA
Pembangunan , Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		4 Dokumen	32,260,262,603	4 Dokumen	105,672,110,014	4 Dokumen	369,430,317,868	4 Dokumen	342,781,636,228	5 Dokumen	286,004,735,610	4 Dokumen	429,641,337,569	BIDANG CIPTA KARYA
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan		7 unit	23,747,661,600	1 Bangunan Gedung	15,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG CIPTA KARYA
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara		74 Rumah Negara	65,632,650	74 Rumah Negara	145,000,000	74 Rumah Negara	145,000,000	74 Rumah Negara	145,000,000	74 Rumah Negara	145,000,000	74 Rumah Negara	145,000,000	BIDANG CIPTA KARYA
Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi		28 Orang	92,597,850	50 Orang	195,000,000	50 Orang	195,000,000	50 Orang	195,000,000	50 Orang	195,000,000	50 Orang	195,000,000	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembinaan Penyelenggara an Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		-	0	600 Orang	313,468, 800	800 Orang	450,000, 000	900 Orang	550,000, 000	1000 Orang	650,000, 000	1000 Orang	700,000,0 00	UPTD PENGAW ASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUN AN DAN GEDUN G

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggara an Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan		-	0	10 Banguna n Gedung Cagar Budaya	480,000, 000	10 Banguna n Gedung Cagar Budaya	500,000, 000	10 Banguna n Gedung Cagar Budaya	600,000, 000	10 Banguna n Gedung Cagar Budaya	600,000, 000	10 Banguna n Gedung Cagar Budaya	750,000,0 00	UPTD PENGAW ASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUN AN DAN GEDUN G
Pengubahsuai an Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan		-	0	2 Banguna n Gedung	932,069, 740	2 Banguna n Gedung	1,045,00 0,000	2 Banguna n Gedung	1,149,50 0,000	2 Banguna n Gedung	1,264,45 0,000	2 Banguna n Gedung	1,390,895, 000	UPTD PENGAW ASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUN AN DAN GEDUN G

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembangunan , Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		60 Dokume n	72,760,415	60 Dokume n	205,285,132	60 Dokume n	284,100,000	60 Dokume n	312,510,000	60 Dokume n	312,510,000	60 Dokume n	343,761,000	UPTD PENGAWASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		-	0	8 Banguna n Gedung	577,000,000	8 Banguna n Gedung	900,000,000	10 Banguna n Gedung	950,000,000	10 Banguna n Gedung	1,000,000,000	10 Banguna n Gedung	1,050,000,000	UPTD PENGAWASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	6%	6%	4,011,201,029	16%	2,995,347,900	50%	15,109,170,530	93%	3,334,400,000	100%	3,681,280,000	100%	6,242,193,666	BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkn at Daerah Penanggun g Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/K ota			2 Kawasan	4,011,20 1,029	2 Kawasan	2,995,34 7,900	1 Kawasan	15,109,1 70,530	2 Kawasan	3,334,40 0,000	2 Kawasan	3,681,28 0,000	1 Kawasan	6,242,193 ,666	BIDANG CIPTA KARYA
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan CagarBudaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		0 Kawasan	88,044,9 78	2 Kawasan	2,600,00 0,000	1 Kawasan	14,299,1 70,530	2 Kawasan	2,600,00 0,000	2 Kawasan	2,800,00 0,000	1 Kawasan	5,184,657, 666	BIDANG CIPTA KARYA
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		4 Dokume n	3,779,92 1,600			3 Dokume n	300,000, 000							BIDANG CIPTA KARYA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota - (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan		19 Kabupat en/Kota	75,989,7 87	19 Kabupat en/Kota	395,347, 900	19 Kabupat en/Kota	510,000, 000	19 Kabupat en/Kota	734,400, 000	19 Kabupat en/Kota	881,280, 000	19 Kabupat en/Kota	1,057,536, 000	UPTD PENGAW ASAN DAN PENGEN DALIAN BANGUN AN DAN GEDUN G
PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG		88.5%		873,389, 280	89%	5,075,00 0,000	89.50%	5,950,00 0,000	90%	6,800,00 0,000	90.50%	7,250,00 0,000	91%	8,100,000 ,000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang			185,338, 600	89%	450,000, 000	89.50%	675,000, 000	90%	750,000, 000	90.50%	825,000, 000	91%	900,000,0 00	
Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Pergub selain RTRW Provinsi		1 dokume n	76,350,9 50	1 dokume n	0	1 dokume n	150,000, 000	1 dokume n	175,000, 000	1 dokume n	200,000, 000	1 dokume n	225,000,0 00	BIDANG TATA RUANG
Penyebarluasa n Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang (3 publikasi)		3 publikasi	50,557,3 00	3 publikasi	250,000, 000	3 publikasi	300,000, 000	3 publikasi	325,000, 000	3 publikasi	350,000, 000	3 publikasi	375,000,0 00	BIDANG TATA RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Sosialisasi		225 orang	58,430,3 50	225 orang	200,000, 000	250 orang	225,000, 000	250 orang	250,000, 000	250 orang	275,000, 000	250 orang	300,000,0 00	BIDANG TATA RUANG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pedoman Bidang Penataan ruang															
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				224,595,750	89%	3,175,000,000	89.50%	3,350,000,000	90%	3,825,000,000	90.50%	4,000,000,000	91%	4,525,000,000	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah masyarakat/ pelajar yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis		1 laporan pelaksanaan (100 peserta)	118,646,400	1 laporan pelaksanaan (120 peserta)	300,000,000	1 laporan pelaksanaan	325,000,000	1 laporan pelaksanaan	350,000,000	1 laporan pelaksanaan	375,000,000	1 laporan pelaksanaan	400,000,000	BIDANG TATA RUANG
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		14 orang	105,949,350	14 orang	200,000,000		0	15 orang	225,000,000		0	15 orang	250,000,000	BIDANG TATA RUANG
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR ke Kabupaten/Kota		1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	BIDANG TATA RUANG
Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/ Kota		1 laporan (2 kab/kota)	0	1 laporan (2 kab/kota)	500,000,000	1 laporan (3 kab/kota)	800,000,000	1 laporan (3 kab/kota)	900,000,000	1 laporan (3 kab/kota)	1,000,000,000	1 laporan (3 kab/kota)	1,100,000,000	BIDANG TATA RUANG
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/ Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari		1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten/kota		1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten /kota	100,000,000	1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten /kota	125,000,000	1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten/kota	150,000,000	1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten /kota	175,000,000	1 dokumen evaluasi ranperda kabupaten /kota	200,000,000	BIDANG TATA RUANG
Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya data SHP Peta Dasar		1 Peta		1 Peta	175,000,000		0		0		0		0	BIDANG TATA RUANG
Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota		1 Berita Acara	0		0		0		0	1 Berita Acara	150,000,000	1 Berita Acara	175,000,000	BIDANG TATA RUANG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kabupaten/ Kota															
Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokume n RDTR		1 Dokume n RDTR	1,900,00 0,000	1 Dokume n RDTR	2,100,00 0,000	1 Dokume n RDTR	2,200,00 0,000	1 Dokume n RDTR	2,300,00 0,000	1 Dokume n RDTR	2,400,000, 000	BIDANG TATA RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			190,618, 711	89%	400,000, 000	89.50%	400,000, 000	90%	575,000, 000	90.50%	600,000, 000	91%	700,000,0 00	
Koordinasi Penyelenggara an Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelen ggaraan penataaa n ruang	83,375,2 50											BIDANG TATA RUANG
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan persetujuan KKPR yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		layanan KKPR			0			1 layanan KKPR	100,000, 000	1 layanan KKPR	125,000, 000	1 layanan KKPR	150,000,0 00	BIDANG TATA RUANG
Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		layanan KKPR		3 layanan KKPR	125,000, 000	3 layanan KKPR	125,000, 000	3 layanan KKPR	150,000, 000	3 layanan KKPR	150,000, 000	3 layanan KKPR	175,000,0 00	BIDANG TATA RUANG
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang		dokume n	107,243, 461	1 Dokume n	150,000, 000	1 Dokume n	150,000, 000	1 Dokume n	175,000, 000	1 Dokume n	175,000, 000	1 Dokume n	200,000,0 00	BIDANG TATA RUANG
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		dokume n		1 Dokume n	125,000, 000	1 Dokume n	125,000, 000	1 Dokume n	150,000, 000	1 Dokume n	150,000, 000	1 Dokume n	175,000,0 00	BIDANG TATA RUANG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi	9.80%		272,836,200	11.80%	1,050,000,000	15.80%	1,525,000,000	17.80%	1,650,000,000	21.80%	1,825,000,000	23.80%	1,975,000,000	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		kasus				1 kasus	100,000,000	1 kasus	100,000,000	1 kasus	125,000,000	1 kasus	125,000,000	BIDANG TATA RUANG
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			37,480,050											BIDANG TATA RUANG
Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang		kasus		1 kasus		1 kasus	300,000,000	1 kasus	300,000,000	1 kasus	325,000,000	1 kasus	325,000,000	BIDANG TATA RUANG
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat		Dokumen		1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	175,000,000			1 Dokumen	175,000,000	BIDANG TATA RUANG
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan di kab/kota		2 Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	275,000,000	BIDANG TATA RUANG
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		1 Kasus		1 Kasus	200,000,000	1 Kasus	225,000,000	1 Kasus	225,000,000	1 Kasus	250,000,000	1 Kasus	275,000,000	BIDANG TATA RUANG
Fasilitasi forum penataan ruang di	Rekomendasi atas Fasilitasi Forum Penataan Ruang di provinsi		Dokumen	53,707,750	Dokumen	300,000,000	Dokumen	325,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	375,000,000	BIDANG TATA RUANG

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
lingkungan provinsi																
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang		1 Laporan	104,004,650											BIDANG TATA RUANG	
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		1 Dokumen	0		0		0		0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	BIDANG TATA RUANG	
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang		1 Berita Acara	37,753,700		0		0		0		0		0	BIDANG TATA RUANG	
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang		1 Dokumen	39,890,050		0		1 Dokumen	100,000,000		0	1 Dokumen	125,000,000		0	BIDANG TATA RUANG
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen		(3 dokumen PKKPR dan 3 dokumen PMP UMK)	200,000,000	(3 dokumen PKKPR dan 3 dokumen PMP UMK)	250,000,000	(2 dokumen PKKPR dan 4 dokumen PMP UMK)	250,000,000	(2 dokumen PKKPR dan 4 dokumen PMP UMK)	275,000,000	(2 dokumen PKKPR dan 5 dokumen PMP UMK)	300,000,000	BIDANG TATA RUANG	

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota			
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola di TPA/TPST Regional			
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		
				Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kab/Kota	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kab/Kota	
				Pembangunan TPA/TPST/SPA	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah Kab/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik			
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik			
			Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
				Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
				Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
				Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan			
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
				Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Subkegiatan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan			
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
				Rehabilitasi Jalan	
				Rekonstruksi Jalan	
				Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
				Pengelolaan Leger Jalan	
				Penggantian Jembatan	
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
				Pembangunan Jembatan	
				Pembangunan Jalan	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
				Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	
				Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	
				Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota	
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/ Kota	
				Penyusunan Peta Dasar	
				Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/ Kota	
				Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
1	2	3	4		5
				Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	
				Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
				Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
				Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
				Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
				Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
				Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	
				Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
				Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2025 - 2029

No	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3						4
1.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	10.00	11.25	12.50	13.75	15.00	18.57	
2.	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	41.23	44.17	47.12	50.06	53.00	55.92	
3.	Rata – Rata Lama Waktu Tempuh pada Ruas Jalan Provinsi	2.95	2.85	2.75	2.66	2.58	2.50	
4.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan RTRW Provinsi	88.50	89.00	89.50	90.00	90.50	91.00	
5.	Bangunan dan lingkungan yang ditata secara optimal	6.00	16.00	50.00	58.00	66.00	100.00	

Selain itu terdapat juga Indikator kinerja kunci (IKK) yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja kunci Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2030 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	%	2.00	4.50	21.00	37.50	43.50	43.50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lintas Kabupaten/Kota								
2	Persentase Peningkatan Sampah Yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	12.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	
3	Persentase Peningkatan RT yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	10.00	11.25	12.50	13.75	15.00	18.57	
4	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	%	-	4.00	8.00	29.00	81.00	100.00	
5	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	
6	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	%	12.00	20.00	35.00	53.00	71.00	85.00	
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	6.00	16.00	50.00	58.00	66.00	100.00	
8	Tingkat Kemantapan Jalan	%	70.55	72.15	73.57	74.78	76.40	79.47	
9	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	9.80	11.80	15.80	17.80	21.80	23.80	

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama periode Renstra 2025 – 2029 diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama, yaitu *meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas*. Hal ini diwujudkan melalui sasaran strategis berupa peningkatan cakupan air minum perpipaan, peningkatan akses sanitasi aman, penataan bangunan dan lingkungan, peningkatan kemantapan jalan, serta terwujudnya penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirumuskan program dan kegiatan prioritas yang mencakup pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem air limbah domestik, sistem drainase, penataan bangunan dan lingkungan, penyelenggaraan jalan provinsi, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Program-program ini didukung dengan pagu indikatif tahunan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan, serta diselaraskan dengan tujuan RPJMD dan NSPK bidang terkait.

Pelaksanaan pembangunan akan dikendalikan melalui mekanisme pengendalian internal dan koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran. Instrumen pengendalian dilakukan melalui:

1. **Perencanaan tahunan** (RKPD, Renja, dan DPA) yang mengacu pada Renstra.
2. **Monitoring dan pengawasan** terhadap ketercapaian output dan outcome program/kegiatan.
3. **Laporan kinerja** tahunan (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan.
4. **Koordinasi lintas perangkat daerah** dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program strategis yang bersifat regional.

Sementara itu, **evaluasi pelaksanaan pembangunan** dilakukan secara periodik dengan menilai capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator



kinerja kunci (IKK). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta relevansi program terhadap sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi langkah perbaikan, penyesuaian kebijakan, maupun realokasi sumber daya pada tahun berjalan maupun periode selanjutnya.

Dengan demikian, keberhasilan Renstra sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan program, disiplin dalam pengendalian, serta objektivitas dalam evaluasi. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu untuk mewujudkan infrastruktur Sumatera Barat yang merata, tangguh, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.